

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 135/PUU-XIII/2015 TENTANG HAK MEMILIH
DALAM PEMILU BAGI ORANG YANG TERKENA GANGGUAN
JIWA PERSPEKTIF FIQIH *SIYÂSAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh

MUHAMMAD RENALDI
NIM. 1502110460

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2019 M / 1441 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH
: KONSTITUSI NOMOR: 135/PUU-XIII/2015 TENTANG
HAK MEMILIH DALAM PEMILU BAGI ORANG
YANG TERKENA GANGGUAN JIWA PERSPEKTIF
FIQIH *SIYÂSAH***

NAMA : MUHAMMAD RENALDI

NIM : 150 211 0460

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

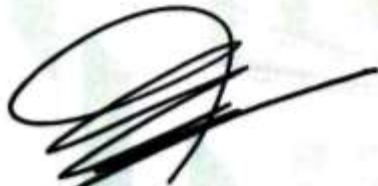
JENJANG : STRATA I (S1)

Palangka Raya, 23 Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Surya Sukti M.A.
NIP. 196505161994021002



Rafik Patrajiaya, M.H.I.
NIK. 19002252016091022


Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. Surya Sukti M.A.
NIP. 196505161994021002



Munib, M.Ag.
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

HAL: **MOHON DIUJI SKRIPSI**

Palangka Raya, 23 Oktober 2019

Sdr. Muhammad Renaldi

Kepada

YTH. Ketua Panitia Ujian

Skripsi

IAIN PALANGKA RAYA

Di-

Palangka Raya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menganggap bahwa Skripsi saudara:

NAMA: MUHAMMAD RENALDI

NIM : 1502110460

**JUDUL: RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR: 135/PUU-XIII/2015
TENTANG HAK MEMILIH DALAM PEMILU BAGI
ORANG YANG TERKENA GANGGUAN JIWA
PERSPEKTIF FIQH SIYÂSAH**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

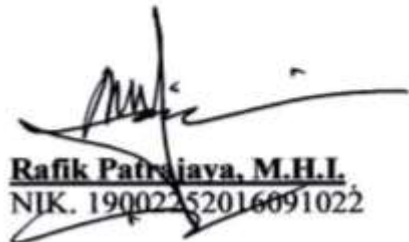
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Surya Sukti M.A.
NIP. 196505161994021002



Rafik Patra Jaya, M.H.I.
NIK. 19002352016091022

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “*RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 135/PUU-XIII/2015 TENTANG HAK MEMILIH DALAM PEMILU BAGI ORANG YANG TERKENA GANGGUAN JIWA PERSPEKTIF FIQIH *SIYÂSAH*”. Oleh MUHAMMAD RENALDI, NIM 1502110460 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya:

Hari : Kamis
Tanggal : 3 Rabiul Awwal 1441 H
31 Oktober 2019

Palangka Raya, Oktober 2019

Tim Penguji:

1. MUNIB, M.Ag.
Ketua Sidang
2. H. SYAIKHU, M.H.I
Penguji I
3. Drs. SURYA SUKTI, M.A
Penguji II
4. RAFIK PATRAJAYA, M.H.I
Sekretaris Sidang

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya



Dr. H. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197704132003121003

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 135/PUU-XIII/2015 TENTANG HAK MEMILIH
DALAM PEMILU BAGI ORANG YANG TERKENA GANGGUAN
JIWA PERSPEKTIF FIQIH SIYÂSAH**

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 135/PUU-XIII/2015 membahas tentang orang dalam gangguan jiwa mendapatkan hak pilih dalam Pemilu (Pemilihan Umum), fokus masalah penelitian ini: (1) Apa latar belakang putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 mengenai hak memilih dalam pemilu bagi orang yang terkena gangguan jiwa. (2) Bagaimana *Rasio Decidendi* putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 tersebut. (3) Bagaimana putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 ditinjau perspektif Fiqih *Siyâsah*.

Metode penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif Eksplanatoris. Adapun Teknik pengumpulan data yaitu dengan bahan hukum Primer yaitu Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 dan Sekunder dengan cara membaca dan mengutip bahan hukum yang ada kaitannya dengan pokok-pokok bahasan berupa literatur- literatur hukum, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah *Pertama* Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberi penafsiran dalam amar putusannya bahwasanya orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak selamanya dalam artitan sewaktu-waktu bisa sembuh atau disembuhkan tidak seperti orang yang sakit jiwa (gila), yang jelas-jelas permanen. karena didalam UU yang disebut adalah gangguan jiwa maka MK membatalkan Undang-undang tersebut dengan dasar UUD yang jelas- jelas Undang-undang tersebut sangat bertentangan. *Kedua* Hakim dalam menentukan apakah orang dalam gangguan jiwa boleh memilih atau tidak, hakim dapat berijtihad dengan menggunakan metode istinhbat hukum, yaitu hakim bisa melihat teks Undang-undang terdahulu atau aturan yang berkaitan dengan persyaratan dalam memilih, kemudian hakim melihat dari segi kebahasan teks yang bersifat khusus. Hakim juga penetapan hukum yang bertumpu subtansi hukum Islam (*al-iltifât ilā ala-ma'āni wa al-maqāsid*), yang terwujud dalam bentuk metode *qiyas*, *istihsān*, *mashlahah mursalah*, dan lain-lain. *Ketiga* Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XIII/2015 yang membolehkan penyandang disabilitas mental tersebut sesuai dengan *fiqih siyāsah* yaitu *Al- Maslahah al-mursalah* demi kemaslahatan ummat, supaya hak pilih nya tidak hilang dengan syarat-syarat tertentu yaitu: Pertama, berumur 17 tahun/pernah kawin. Kedua, surat rekomendasi dari dokter. Ketiga, dalam keadaan tenang.

Kata kunci: Putusan MK, Gangguan Jiwa, *fiqh siyāsah*.

**RATIO DECIDENDI OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION
NUMBER: 135 / PUU-XIII / 2015 CONCERNING THE RIGHT TO VOTE IN
ELECTIONS FOR PEOPLE WHO ARE AFFECTED BY MENTAL
DISORDERS IN THE PERSPECTIVE OF FIQIH SIYÂSAH**

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number. 135/PUU-XIII/2015 discuss about people in mental disorders getting the right to vote in the Election, the focus of this research problem: (1) What is the background of the Constitutional Court Decision No.135/PUU-XIII/2015 concerning the right to vote in elections for people affected by mental disorders. (2) How is the Ratio Decidendi of the Constitutional Court Decision No.135/PUU-XIII/2015. (3) How is the Constitutional Court Decision No.135/PUU-XIII/2015 reviewed by the perspective of Fiqh *Siyâsah*.

This research method is normative with a qualitative exploratory research approach. The data collection technique are the Primary legal material, namely the Constitutional Court Decision No.135/PUU-XIII/2015 and Secondary by reading and quoting legal material that is related to the main topics in the form of legal literature, documents and legislation.

The results of this study are: *First*, The Constitutional Court Decision has given an interpretation in its judicial verdict that people with mental / memory disorders that impermanent which means at any time can be recover or cured unlike people who are mental disorders(crazy), who are clearly permanent. Meanwhile in the Law (UU) which referred to as a mental disorder, the Constitutional Court overturned that Law (UU), based on the constitution (UUD) that Law (UU) was very contradictory. *Second*, the judge in determining whether a person in a mental disorder could vote or not, the judge might do the personal examination (*Ijtihad*) using the *istinbat* method, which is, the judge preview the text of the previous law or the rules relating to the conditions in voting, then the judge sees the text language which is particular. The judge also determines the law which is based on the substance of Islamic law (*al-iltifāt ilā ala-ma'āni wa al-maqāsid*), which is manifested in the form of the *qiyas*, *istihsān*, *mashlahah mursalah* methods, and others. *Third*, the Constitutional Court Decision No.135/PUU-XIII/2015 that allows people with mental disabilities in accordance with the *fiqh siyâsah* namely *al-Maslahat al-mursalah* for the benefit of the Ummah, so that the right to vote is not unused with certain conditions, namely: First, aged 17 years old / have been married. Second, a letter of recommendation from a doctor. Third, in a calm state.

Keywords: Constitutional Court Decision, Mental Disorders, fiqh siyâsah.

KATA PENGANTAR

Tiada ungkapan yang patut diucapkan selain pujian dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi keimanan, kesehatan, kesabaran serta melebihi manusia dengan akal dan ilmu-Nya sehingga skripsi yang berjudul “***RATIO DECIDENDI*** PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 135/PUU-XIII/2015 TENTANG HAK MEMILIH DALAM PEMILU BAGI ORANG YANG TERKENA GANGGUAN JIWA PERSPEKTIF FIQIH *SIYÂSAH*” ini dapat diselesaikan. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman.

Penelitian dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Penghormatan serta penghargaan tak terhingga kepada belahan jiwa yang tercinta, terkasih dan tersayang Ibunda Jamilah dan Ayahanda Muliadi serta seluruh keluarga yang telah memberikan ribuan kasih sayang, do’a, motivasi dan semangat untuk terus menuntut ilmu. Dengan mengharap keberkahan mereka semoga peneliti bisa meraih keselamatan dan kesuksesan di dunia dan akhirat.
2. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya atas kesempatan,

fasilitas, dan segala bentuk dukungan yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

3. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
4. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Munib, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syariah, atas sumbangsi pemikiran, gagasan, dan ide kepada peneliti selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
5. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Ibu Norwili, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
6. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak pembelajaran, nasehat dan mutiara hikmah yang berharga, serta motivasi dan bimbingan kepada peneliti.
7. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Drs. Surya Sukti., M.A. selaku Pembimbing I dan juga selaku Wakil Dekan I bidang Akademik beserta Bapak Ali Murtadho, M.H., selaku pembimbing II, dan pengganti Dosen Pembimbing II Bapak Rafik Patrajaya., M.H.I semoga Allah SWT membalas segala kemuliaan hati yang begitu sabar dalam membimbing peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.

8. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya seluruh Dosen dan seluruh Staff Fakultas Syari'ah yang telah bersedia mendidik, mengajar, membimbing dan membantu peneliti selama ini.
9. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar serta saya banggakan rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi teman, sahabat, dan saudara bagi peneliti serta telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama ini.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Besar harapan, kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan hanya kepada-Nya peneliti berserah diri, dan memanjatkan do'a dengan harapan semoga segala aktivitas dan produktivitas peneliti selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah dari Allah SWT dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Palangka Raya, 23 Oktober 2019

Peneliti



MUHAMMAD RENALDI

NIM. 1502110460

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RENALDI
NIM : 150 211 0460
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 19 Mei 1998.
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***“Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/Puu-Xiii/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siyâsah”*** ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, Peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 23 Oktober 2019



MUHAMMAD RENALDI
NIM. 1502110460

MOTO

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada
kemaslahatan”*



PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang membekali dengan ilmu pengetahuan

Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberi hamba keimanan, kekuatan, dan kesabaran.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada imam-ku dunia dan akhirat, Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi yang sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku cintai.

Muliadi dan jamilah

Sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan skripsi ini kepada Ayahanda serta Ibunda tercinta, terkasih, dan tersayang. Maaf, jika selama ini anakmu belum bisa menggores senyum di wajahmu. Tak kan bisa ku balas setiap tetes peluh keringatmu hanya dengan selebar kertas dalam persembahan ini. Semoga di lain waktu bisa melukis senyum di wajahmu, mengukir bangga di hatimu. Sebutlah namaku selalu dalam setiap bait do'a mu.

Ustadz Abdullah

Teruntuk guruku ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Terimakasih telah memberikan ilmu, pemahaman dan pelajaran hidup sehingga saya dapat menyelesaikan studi S (1) di IAIN Palangka Raya, semoga saya juga dapat mengikuti jejakmu melanjutkan kuliah di Strata (2) Universitas Qashim Arab Saudi.

Seluruh Keluarga Besar HKT15

Berakhirnya masa studi ini tidak akan merubah pertemanan, persahabatan, kekeluargaan yang telah dirajut selama ini. Selalu berbekas dalam sanubari setiap kenangan, suka dan duka yang kita lewati. Kita adalah keluarga, tak akan pernah putus walau termakan masa. Sukses untuk kita.

Seluruh Civitas Akademik IAIN Palangka Raya

Terimakasih atas ilmu, nasehat, didikan, ajaran yang diberikan selama ini. Semoga selalu mentaati dan menjalankan segala petuahmu. Setinggi apapun pangkat dan jabatan ku nanti, tak akan merubah status murid dalam diri ini. Terimakasih duhai Guru. Semoga Allah membalas jasamu.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penulisan	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	20
1. Teori Keberlakuan Hukum	20

2.	Teori Keadilan	22
3.	Teori <i>Maslahah</i>	25
4.	Teori <i>Maqāshid Syariah</i> Jasser Auda.....	29
C.	Konsep Penelitian.....	36
1.	Pengertian <i>Ratio Decidendi</i>	36
2.	Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	37
3.	Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi	39
4.	Pengertian Fiqih <i>Siyāṣah</i>	41
5.	Pemahaman Tentang Orang Dalam Gangguan Jiwa	43
6.	Hal-hal yang mempengaruhi kecakapan berbuat hukum (<i>'Awaridh</i>).....	48
7.	Subjek Hukum dan Cakap Hukum	50
D.	Kerangka Pikir, Denah Penelitian dan Fokus Penelitian.....	53
1.	Kerangka Pikir	53
2.	Denah Penelitian	56
3.	Fokus Penelitian.....	57
BAB III METODE PENELITIAN.....		58
A.	Metode Penelitian.....	58
B.	Pendekatan Penelitian	59
C.	Waktu Penelitian	61
D.	Jenis dan Bahan Hukum	62
E.	Teknik Pengumpulan Data	63
F.	Pengolahan Data	64
G.	Metode Analisis Data	65

BAB IV ANALISIS DATA.....	67
A. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 135/PUU-XIII/2015 67	
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015.....	82
C. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 ditinjau perspektif <i>Fiqh Siyyasah</i>	95
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
A. Buku	108
B. Internet	111
C. Jurnal	111

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama republik indonesia dan menteri pendidikan dan kebudayaan, nomor 158 tahun 1987 dan 0543/b/11/1987, tanggal 22 januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te

ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain’	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----َ-----	Fathah	a	a
-----ِ-----	Kasrah	i	i
-----ُ-----	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ : kataba
ذَكَرَ : zukira

يَذْهَبُ : yažhabu
سُئِلَ : su'ila

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ اَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ اَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ اَ اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و--وْ

Dammah dan wau

ū

u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍhommah transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Jika pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

: rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah

: al-Madīnatul Munawwarah

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

الْبِرِّ : al-birr

نَزَّلَ : nazzala

الْحَجُّ : al-ḥajju

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

أَمِرْتُ: umirtu

أَكَلَ: akala

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ: ta'khuḏūna

تَأْكُلُونَ: ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

شَيْءٌ: syai'un

النَّوْءُ: an-nau'un

H. Penelitian kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang Penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini Penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
: fa aufūl-kaila wal-mīzāna

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ: Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau Penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ: Naṣrum minallāhi wa fathun qarīb

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, para pendiri bangsa melihat demokrasi secara utuh, sebagai suatu sistem yang memiliki nilai dan prinsip dasar di samping mekanisme instrumental. Hal itu dapat dilihat dari naskah pembukaan UUD 1945 yang pada alinea pertama telah menegaskan keyakinan kesetaraan melalui kalimat “Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”. Pengakuan tersebut tentu saja meliputi pengakuan atas kemerdekaan dan kebebasan tiap insan manusia. Bahkan pada alinea ketiga juga ditegaskan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya “Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”.¹

Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia terbentuk dalam “Susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat” dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Pernyataan tersebut sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip Negara Konstitusional. Pilihan sistem demokrasi konstitusional dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

¹ Jenedjri M. Gaffar, “*Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*”, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, H. 37

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.²

Salah satu keunggulan dari sistem demokrasi ialah adanya hak dan kewajiban bagi rakyat untuk mengontrol, mengawasi, menasehati, dan mengkritisi, pemimpin yang berkuasa. Kondisi seperti ini membuka peluang emas bagi tegaknya ajaran *amar ma'ruf nahi mungkar* dan membudayanya doktrin satu sama lain. *Amar ma'ruf nahi mungkar* merupakan pilar agama yang paling utama karena dengan ini misi kenabian dapat terwujud. Tanpa *amar ma'ruf nahi mungkar*, tujuan kerasulan tidak akan tercapai, kesesatan dan kebodohan akan merajalela, serta kezhaliman dan kerusakan akan menjadi budaya. Islam mengaitkan budaya *amar ma'ruf nahi mungkar* dengan keimanan dan menjadikannya sebagai salah satu sifat kaum muslimin.³ Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁴

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-

² Ibid., H. 38.

³ Afifuddin Muhajir, "*Fiqh Tata Negara (Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam)*", Yogyakarta: IRCiSoD, 2017, H. 110.

⁴ At-Taubah [71].

*Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. AT- Taubah Ayat 71)*⁵

Pada umumnya Negara di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan bentuk Negara berserta konstitusi yaitu kesatuan dan UUD 1945. Dalam pemilihan umum presiden pada saat 5 tahun sekali dengan sistem demokrasi langsung yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu prinsip “kedaulatan rakyat”, sebagaimana dijelaskan 77 dalam syarah No.2 Bab I. Melalui pemilu rakyat ikut menentukan siapa yang terbaik bagi mereka untuk menjadi pemimpin (Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa) atau wakil dalam lembaga legislative (DPR-RI/DPR-D/DPD) yang menurut keyakinan mereka minimal memiliki dua kualifikasi: kecakapan (*fathanah/capability*) menjalankan tugasnya, dan sifat amanah (*credibility*) dalam mengemban mandate rakyat, benar-benar untuk rakyat yang memberikan mandat di pundaknya.⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan definisi bahwa penyandang disabilitas setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan

⁵ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an & Terjemahannya*”, Jakarta: Depag RI, 2008, H. 189.

⁶ Masdar Farid Mas’udi, “*Syarah Konstitusi Uud 1945 Dalam Perspektif Islam*”, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011, H 103.

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁷

Dalam Undang-Undang Hak Manusia juga menjamin bahwa setiap warga Negara Indonesia ini tertuang dalam pasal 28 D sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
3. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.

Pada zaman kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa akhir jabatannya mengeluarkan perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota bahwa pemilihan kepala daera dipilih secara langsung. Atas dasar inisiatif dari DPR perpu tersebut langsung direvisi yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Namun hal tersebut ada beberapa pasal yang di permasalahan seperti pasal 57 ayat (3) huruf a bahwa salah satu persyaratan warga Negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang sedang *“tidak terganggu jiwa dan ingatannya”* hal tersebut yang membuat beberapa LSM dan Individu menggugat ke Mahkamah Konstitusi, adapun LSM yang menggugat yaitu Perhimpun Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat

⁷ Eko Riyadi, *“HUKUM HAK ASASI MANUSIA (Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional)”*, Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2018, H. 257.

(PPUA PENCA), Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Khoirunnisa Nur Agustyati. Mereka menggugat bahwasanya pasal tersebut belum begitu jelas terkait makna *“tidak mengganggu jiwa dan ingatannya”* dan orang gangguan jiwa seperti apa yang tidak diperbolehkan untuk memilih dalam pemilu tersebut, sehingga apabila Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 57 ayat (3) huruf a diberlakukan maka yang demikian itu akan menghilangkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga Negara dihadapan hukum yang mestinya dipenuhi oleh Negara. Dalam argumentasi permohonannya nomor 9 menyatakan Bahwa Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay pada persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2014 mengatakan:

“tidak ada larangan khusus di undang-undang bagi penyandang gangguan mental baik yang tinggal di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) maupun yang sudah keluar atau berobat jalan untuk mengikuti pemilu. Pada dasarnya semua sama. Tapi kemampuan mereka jika tidak mungkin, kalau sedang akut tentu tidak bisa. Namun, kalau sedang tenang bisa. Jadi sangat bergantung pada kondisi yang bersangkutan”.

Dalam hal ini dijelaskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 135/PUU-XIII/2015 Tentang Hak Memilih Orang Yang Dalam Gangguan Jiwa dalam amar putusannnya menyatakan sebagai berikut:

“Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:

- 1.1. *Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”;*
- 1.2. *Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”;*
2. *Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;*
3. *Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.⁸*

Gangguan jiwa dapat mengenai setiap orang, tanpa mengenal umur, ras, agama, maupun status sosial-ekonomi. Gangguan jiwa bukan disebabkan oleh kelemahan pribadi. Di masyarakat banyak beredar kepercayaan atau mitos yang salah mengenai gangguan jiwa, ada yang percaya bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh gangguan roh jahat, ada yang menuduh bahwa itu akibat guna-guna, karena kutukan atau hukuman atas dosanya. Kepercayaan yang salah ini hanya akan merugikan

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, Tentang Hak Memilih Orang dalam Gangguan Jiwa.

penderita dan keluarganya karena pengidap gangguan jiwa tidak mendapat pengobatan secara cepat dan tepat.⁹

Orang gangguan jiwa dalam hukum Islam disebutkan bahwa tidak akan terbebani oleh Hukum kecuali dengan 3 (tiga) perkara yaitu, orang gila, orang yang tidur dan anak-anak sampai dia baligh. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

Artinya: “Tiga orang yang tidak dianggap bertanggung jawab atas pertanggungjawaban atas perbuatannya, yaitu orang gila hingga ia kembali waras, orang yang tidur hingga ia tersadar (bangun) dari tidurnya, dan anak-anak hingga ia bermimpi (baligh). (H.R Bukhari, Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Nasai, dan Ibnu Majah)¹⁰

Orang dalam gangguan jiwa atau mental tidak diwajibkan melaksanakan ibadah seperti Tharah, Sholat, Puasa haji dan ibadah lainnya. Melakukan suatu mumalah tidak dianggap sah karena ucapannya secara umum tidak dianggap, orang gila melakukan perbuatan pidana tidak dapat dikenai hukuman juga karena akal dan jiwanya yang membatasinya sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Kecuali zakat, karena jika dia mempunyai harta, yang dibayarkan oleh walinya, sebagaimana diminta juga untuk membayar denda, ganti rugi, jika ia merusak sesuatu; karena hal ini masuk dalam kategori kewajiban wadh'i (kewajiban yang

⁹ Andriani Putri, “Klasifikasi Gangguan Jiwa”, Medan: Universitas Sumatera Utara, Tanpa Tahun, Tanpa Halaman.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Dillatuhu”, Jakarta: Gema Insani, 2007, H. 601.

dikaitkan dengan pihak lain) bukan kewajiban *taklif* (kewajiban yang berkaitan dengan pelaku).

Oleh karena itu, penulis memandang penting untuk mengkaji dan mendalaminya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“*RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 135/PUU-XIII/2015 TENTANG HAK MEMILIH DALAM PEMILU BAGI ORANG YANG TERKENA GANGGUAN JIWA PERSPEKTIF FIQIH *SIYYASAH*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Masalah di atas, maka peneliti merumuskan dalam rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa latar belakang putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 mengenai hak memilih dalam pemilu bagi orang yang terkena gangguan jiwa?
2. Bagaimana *Rasio Decidendi* putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 tersebut?
3. Bagaimana putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 ditinjau perspektif Fiqih *Siyâsah*?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yakni merupakan ruang lingkup masalah yang telah diidentifikasi dan dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga lebih tertuju dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Maka penulis memfokuskan masalah yaitu:

1. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi perihal hak pilih bagi penyandang Disabilitas Mental dalam pemilihan umum.
2. Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi perihal hak pilih bagi penyandang Disabilitas Mental dalam pemilihan umum dalam perspektif Fiqh *Siyāsah*.

D. Tujuan Penulisan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai pertimbangan hakim memutuskan MK Nomor: 135/PUU-XIII/2015 dengan menggunakan beberapa pendekatan ilmiah. Oleh karena itu ada beberapa studi kajian yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 mengenai hak memilih dalam pemilu bagi orang yang terkena gangguan jiwa.
2. Untuk menjelaskan Pertimbangan Hakim (*Rasio Decidendi*) putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 tersebut.
3. Untuk menganalisis putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 ditinjau perspektif Fiqh *Siyāsah*.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk

pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni:

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan ilmu mengenai analisis putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 mengenai hak memilih dalam pemilu bagi orang yang terkena gangguan jiwa.
- b. Meninjau diperbolehkannya orang yang terkena gangguan jiwa memilih pada saat pemilu serentak nanti.
- c. Mengkaji dengan kritis pertimbangan hakim dalam memutuskan hak memilih dalam pemilu bagi orang yang terkena gangguan jiwa.
- d. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- e. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 tentang hak memilih dalam pemilu orang yang terkena gangguan jiwa perspektif fiqih *siyyasâh*, bagi kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk bahan pertimbangan hukum dalam fenomena sosial di masyarakat luas mengenai hak memilih dalam pemilu bagi orang yang terkena gangguan jiwa.
- b. Untuk menjadikan suatu landasan peninjauan kembali terhadap Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 tersebut.
- c. Untuk dapat dijadikan suatu dasar yang berkekuatan hukum tetap agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat awam.

F. Sistematika Penelitian

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Dalam skripsi ini, peneliti akan membahas beberapa masalah yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang akan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan Masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

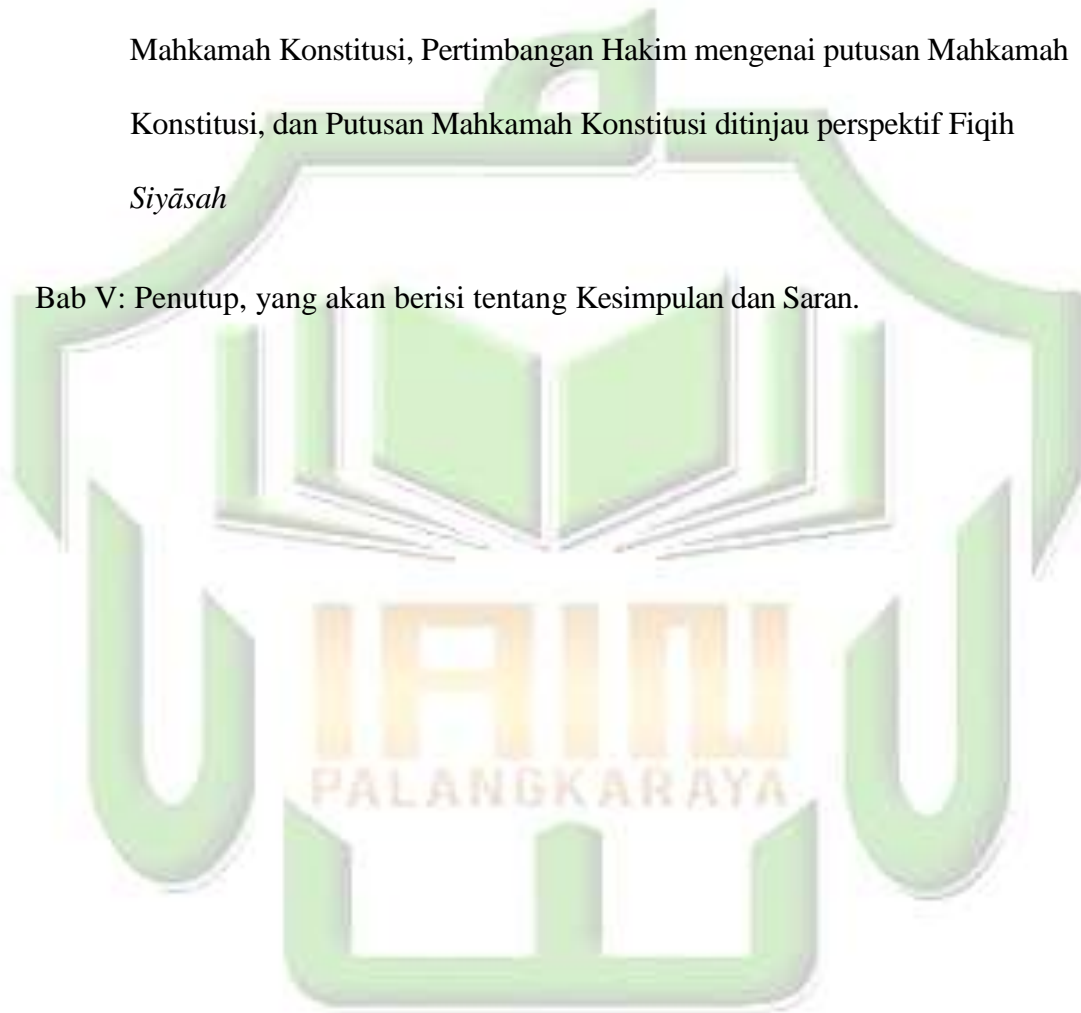
Bab II: Kajian Pustaka, yang akan berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka teoretik, deskripsi teoretik, kerangka pikir dan pertanyaan penelitian.

Bab III: Pada Bab ini membahas tentang metode penelitian, tipe dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, yang terakhir pengolahan data.

Bab IV: Pembahasan dan Analisis data mengenai Latar Belakang Putusan

Mahkamah Konstitusi, Pertimbangan Hakim mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau perspektif Fiqih *Siyāsah*

Bab V: Penutup, yang akan berisi tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait tema Hak Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa terdapat beberapa Skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui di antaranya sebagai berikut:

1. Muhammad Aziz, NIM 212028, Kudus: Program Studi Ahwal AL Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017, dengan judul ***“Pemeliharaan Dan Pemenuhan Hak-Hak Orang Gila Pada Pasal 147 Dan 148 Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam”***. Dengan rumusan masalah yaitu, (1). Bagaimana pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila pada Pasal 147 dan 148 dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan? (2). Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap

pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila pada Pasal 147 dan 148 dalam Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan? Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan metode yang digunakan adalah literatur dengan menggunakan analisis data berupa induktif, artinya berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi generalisasi yang mempunyai sifat umum. Fokus penelitian ini yaitu pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang dalam gangguan jiwa dalam hal ini peneliti mengambil pasal 148 UU No.36 Tahun 2009. Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut:

“Bunyi Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang kesehatan yang menyatakan “*Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara*”. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam menyembuhkan orang sakit jiwa akan lebih jelas lagi jika kita membaca ketentuan Pasal 149 salah satunya sebagai berikut: Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.¹¹”

2. Ahmad Khoiru Mutho'in, NIM 01371017, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2009, dengan judul “*Syarat-Syarat Pemilih dalam Pilkada (Perspektif Fiqih Siyāsah)*”. Dengan rumusan masalah yaitu, (1). Apa syarat-syarat pemilih dalam Pilkada? (2). Bagaimana pandangan Fiqih *siyāsah* terhadap syarat-syarat Pilkada? Ini

¹¹ Muhammad Aziz, “*Skripsi Tentang Pemeliharaan dan Pemenuhan Hak-Hak Orang Gila Pada Pasal 147 dan 148 dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, 2017, H.41.

merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan bahan-bahan pustaka sebagai acuannya. Sebagai sumber primer adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat syarat-syarat pemilih dalam Pilkada dan buku-buku yang mengulas prinsip-prinsip umum Fiqih *siyāsah*. Sebagai sumber data sekunder adalah buku-buku tentang teori pemilihan pemimpin dalam sejarah Islam dan buku-buku tentang mekanisme dan dinamika Pilkada. Data-data tersebut deskripsikan untuk kemudian dianalisis. Fokus penelitian ini membahas tentang Ketentuan-hetentuan UU mengenai syarat-syarat pemilih Pertama, seseorang memilih hah pilih jika telah berusia 17 tahun dan atau telah kawin. Kedua, untuh menggunakan hak pilih, seseorang harus didaftar sebagai pemilih, dengan syarat dia tidak terganggu jiwa atau ingatannya dan hak pilihnya tidak sedang dicabut berdasarkan keputusan pengadilan yang memilih berkekuatan hukum tetap. Ketiga, seorang pemilih hanya dapat didaftar satu hali. Keempat, bagi seseorang yang memiliki tempat tinggal lebih dari satu, dia harus memutuskan satu tempat tinggal saja untuk didaftar sebagai pemilih. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bahwa syarat-syarat pemilih dalam Pilkada telah sesuai dengan prinsip-prinsip umum Fiqih Siyasah. Kesesuaian itu dapat dilihat antara lain dari tiga hal. Pertama, bahwa syarat- syarat pemilih dalam Pilhada mengakomodir partisipasi setiap individu dalam pemilihan pemimpin. Kedua, bahwa syarat-syarat pemilih dalam Pilkada menetapkan batas-batas kelayakan tertentu bagi seseorang untuh memilih demi menghasilkan tingkat partisipasi yang betul-betul berkualitas. Ketiga, bahwa syarat-syarat pemilih dalam Pilkada

memfasilitasi penggunaan hak pilih setiap individu, antara lain lewat ketentuan yang mengharuskan adanya pendaftaran pemilih oleh petugas dan ketentuan yang membolehkan seseorang memilih di tempat dia suka atau hendak tinggal.”¹²

3. Achmad Mu’as, NIM 031111192, Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas

Airlangga Surabaya Tahun 2015, dengan judul “***Inkonsistensi Putusan Mk***

Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak” Dengan rumusan masalah yaitu, (1).

Konsistensi Mahkamah konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang berbeda

dengan putusan sebelumnya dengan substansi yang sama? (2). Ratio Decidendi

putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan penyelenggaraan pemilu

serentak padahal sebelumnya di putus sebaliknya.? Dengan jenis penelitian

pustaka.

“Penelitian penulisan ini berfokus kepada dua aspek yaitu: *Pertama*, menunjukkan pertimbangan serta konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal kebijakan dalam putusannya yang dituangkan dalam *judicial review*. *Kedua*, mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai pengujian undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden atas penyelenggaraan pemilu serentak. Dari penelitian tersebut, diketahui Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menitikberatkan suatu putusan atas perkembangan hukum dan efisiensi dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu merupakan proses prosedural. Bahwa pada Putusan sebelumnya menyatakan muatan pasal 3 ayat (5) UU Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diuji dianggap tidak bertentangan dengan UUD namun, dikemudian hari Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan mengenai substansi yang sama dianggap bertentangan dengan UUD. Disinilah yang menjadi kajian penulis mengenai inkonsistensi putusan MK terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Mengingat, mengenai penyelenggaraan pemilihan umum menjadi kebijakan hukum terbuka (*opened legal*

¹² Ahmad Khoiru Mutho’in, “*Skripsi Tentang Syarat-Syarat Pemilih dalam Pilkada (Perspektif Fiqih Siyasah)*”, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2009, H. Vi.

policy) pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan mekanisme terbaik mengenai tata cara pemilihan umum, termasuk dalam penentuan waktu antar satu pemilihan dengan pemilihan yang lain merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang.”¹³

Terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara skripsi peneliti dengan penelitian terdahulu, *Pertama* peneliti Muhammad Aziz terdapat Perbedaan penelitian, peneliti terdahulu membahas tentang Pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak orang gila menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menekankan bahwa upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, jaminan ini penting, sedangkan peneliti disini memfokuskan kepada hak memilih dalam pemilu orang dalam gangguan jiwa dan bagaimana pertimbangan seorang hakim mengenai putusan MK tersebut. Namun disini terdapat beberapa kesamaan dengan peneliti terdahulu seperti sama-sama membahas tentang hak orang dalam gangguan jiwa, subjek yang diteliti sama-sama orang dalam gangguan jiwa. *Kedua* peneliti Ahmad khoiru Mutho'in terdapat pula perbedaan dalam penelitian, peneliti terdahulu membahas tentang syarat-syarat memilih dalam Pilkada, lebih komprehensif mengenai apa-apa saja syarat sebagai memilih dan ketentuan apa saja dalam Pilkada berlangsung sedangkan peneliti fokus membahas tentang analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015. Terdapat beberapa persamaan

¹³ Achmad Mu'as, "*Skripsi Tentang Inkonsistensi Putusan MK Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak*", Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2015, Tanpa Halaman.

antara peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti terdahulu juga memakai perspektif *Fiqih Siyāsah* sebagai bedah analisis dalam permasalahan mengenai syarat-syarat memilih. *Ketiga* peneliti Achmad Mu'as ada beberapa perbedaan dengan peneliti. Peneliti terdahulu membahas tentang Inkonsistensi putusan atas penyelenggaraan pemilu serentak, menunjukkan pertimbangan serta konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengawal kebijakan dalam putusannya yang dituangkan dalam *judicial review*, peneliti membahas tentang pertimbangan seorang hakim mengenai terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak memilih dalam Pemilu orang dalam gangguan jiwa. Persamaan antara peneliti dengan peneliti terdahulu mengkaji tentang pertimbangan seorang hakim. Bagaimana hakim bisa membuat putusan sehingga ada beberapa permasalahan yang hendak diteliti.

Adapun persamaan dan perbedaan antara peneliti dengan peneliti terdahulu lebih lanjutnya bisa melihat tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Aziz, “Pemeliharaan Dan Pemenuhan Hak-Hak Orang Gila Pada Pasal 147 Dan 148 Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Tahun 2017, Kajian Pustaka	Berkaitan dengan Hak-Hak orang dalam gangguan jiwa	Putusan MK Nomor 135/PUU-XII/2015 Hak memilih dalam pemilu orang dalam Gangguan dan di tinjau dari perspektif Fikih Siyasah
2.	Ahmad Khoiru Mutho’in, “Syarat-Syarat Pemilih dalam Pilkada (Perspektif Fiqih siyāsah)”, Tahun	Kebolehan Orang dalam gangguan jiwa untuk memilih di pemilu dalam perspektif Fikih	Penelitian ini tidak terlalu membahas mengenai sunjek pemilih dalam pemilu sedangkan berfokus kepada analisis

	2009, Kajian Pustaka.	<i>siyāṣah</i>	putusan hakim terhadap hak memilih orang dalam ganggun jiwa
3.	Achmad Mu'as, <i>“Inkonsistensi Putusan Mk Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak”</i>, Tahun 2015, Kajian Pustaka	Persamaan dalam meneliti penyelenggaraan pemilu serentak.	Meneliti tentang <i>Inkonsistensi</i> putusan MK Sedangkan Peneliti tentang <i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hakim) putusan MK dan subjek kajian

B. Kajian Teori

1. Teori Keberlakuan Hukum

Berlakunya kaidah hukum adalah tentang landasan keberlakuan kaedah hukum untuk menentukan sahnyanya suatu kaedah hukum terdapat tiga landasan (yuridis, sosiologis, filosofis). Keberlakuan hukum secara yuridis, terdapat empat paradigma yaitu W. Sevenbergen, Hans Kelsen, Radbruch dan

Logemann.¹⁴ Landasan yuridis yang menjadikan suatu kaedah hukum itu sah, karena:

- a. Proses penentuannya memadai, baik karena sesuai prosedur yang berlaku atau menurut cara yang telah ditetapkan (W. Sevenbergen),
- b. Sesuai dengan pertingkatan hukum atau kaedah hukum yang lebih tinggi (Hans Kelsen),
- c. Didasarkan kepada sistem/ tertib hukum secara keseluruhan (Gustav Radbruch),
- d. Didasarkan kepada adanya ikatan yang memaksa untuk bersikap tindak/ berperilaku pantas berdasarkan hubungan kondisi dan akibatnya (Logemann).

Keberlakuan kaidah hukum secara sosiologis, berdasarkan kepada penerimaan masyarakat yang dapat dibedakan atas penerimaan melalui teori pengakuan dan teori paksaan. Sedangkan kaidah hukum dinyatakan berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai yang dianut dalam pergaulan hidup masyarakat dengan orientasi kepada kedamaian dan keadilan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka agar suatu hukum dapat berlaku di Indonesia harus memenuhi landasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Keberlakuan hukum secara yuridis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

¹⁴ Muhamad Erwin dan Firman Freaddy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, H. 32.

¹⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, H. 44-45.

berlaku. Keberlakuan hukum secara sosiologis harus sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Keberlakuan hukum secara filosofis harus sesuai dengan ideologi bangsa (Pancasila). Apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka hukum tersebut hanya merupakan kaidah yang mati. Adapun apabila hanya berlaku secara sosiologis (dalam teori paksaan), maka kaidah tersebut hanya menjadi aturan pemaksa. Dan jika hanya berlaku secara filosofis, maka hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Oleh sebab itu, agar suatu hukum berlaku dengan baik harus terpenuhi keberlakuan hukum, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

2. Teori Keadilan

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa dilihat dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁶

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan Komutatif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan Komutatif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami

¹⁶ Carl Joachim Friedrich, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, H. 24.

dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁷ Adapun macam-macam dari teori keadilan yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap merata bagi semua warga negara. Menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan. Aristoteles berpendapat bahwa distribusi ekonomi didasarkan pada prestasi dan peran masing-masing orang dalam mengejar tujuan bersama warga Negara. Keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama (*justice is done when equals are treated equally*).

¹⁷ *Ibid.*, H. 25.

Sebagai contoh: Ali bekerja 10 tahun dan budi bekerja 5 tahun. Pada waktu diberikan hadiah harus dibedakan antara Ali dan Budi, yaitu perbedaan sesuai dengan lamanya bekerja. Menurut Jhon Rawls berpendapat bahwa pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling penting yang dimiliki oleh manusia, dan ini dijamin oleh sistem ekonomi pasar. Pasar memberi peluang bagi penentuan diri manusia sebagai makhluk yang bebas. Ekonomi pasar menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan yang fair. Dalam dunia bisnis, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Keadilan distributif juga berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan yang juga adil dan baik.¹⁸

b. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau warga Negara satu dengan warga Negara yang lainnya. Menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga satu dengan yang lainnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Jika diterapkan dalam bisnis berarti relasi bisnis dagang harus terjalin dengan hubungan yang setara dan seimbang antara pihak yang satu dengan lainnya.

¹⁸ Rawdatul Wafiyah, "*Skripsi Analisis Prinsip Keadilan Terhadap Akad Rahn Emas di BMT*", Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, Hukum Bisnis Syariah, 2012, H. 25.

Dalam bisnis, keadilan komutatif disebut sebagai keadilan tukar, dengan kata lain keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang terlibat. Keadilan ini menuntut agar baik biaya maupun pendapatan sama-sama dipikul secara seimbang. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.¹⁹

3. Teori *Maslahah*

Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh* menjelaskan arti *Mashlahah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *Mashlahah al-mursalah*. Tujuan utama *Mashlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.²⁰

Mashlahah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan

¹⁹ *Ibid.*, H. 26.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *"Ilmu Ushul Fiqh"*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, H. 117.

hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.²¹

Ungkapan bahasa Arab menggunakan *Maslahah* dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, masalah diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah* meskipun manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.²²

Pembagian *Maslahah* dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain, *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *Maslahah* berdasarkan ada atau tidaknya Syariat Islam dalam penetapannya.

1. *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (*Maqāshid*

²¹ Miftahul Arifin, "*Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*", Surabaya: Citra Media, 1997, H. 143.

²² Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh Jilid II*", Jakarta: Kencana, 2009, H. 345.

Syari'ah), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *Maslahah*, yakni:²³

a. *Al- Maslahah al-Daruriyah* (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.²⁴

b. *Al- Maslahah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukshah* (keringanan) dalam ibadah.

c. *Al- Maslahah Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier) adalah memelihara unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.²⁵

2. *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' Sedangkan *Maslahah* dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁶

²³ Ibid

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Satria Effendi, "*Ushul Fiqh*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, H. 149.

- a. *Al- Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *Maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari musuh, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamr untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.²⁷
- b. *Al- Maslahah al-Mulgha*, yaitu sesuatu yang dianggap *Maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyatannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian wasian antara laki-laki dan anak perempuan adalah *Maslahah*. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu surat An-Nisa ayat 11 yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *Maslahah* itu, bukan *Maslahah* di sisi Allah.²⁸
- c. *Al- Maslahah al-Mursalah*, adalah *Maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *Maslahah al-mursalah* ini termasuk jenis *Maslahah* yang didiamkan oleh nash. Dengan demikian *Maslahah al-mursalah*

²⁷ *Ibid.*, H. 150

²⁸ *Ibid.*

merupakan *Maslahah* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia agar terhindar dari kemudharatan.²⁹

4. Teori *Maqāshid Syariah* Jasser Auda

Dalam kajian Islam, *Maqāshid syariah* sangat penting peranannya, ini terkait dengan posisinya sebagai tujuan dari syariah itu sendiri. Secara etimologi *Maqāshid* adalah bentuk jamak dari *maqshad*, yang mempunyai arti: maksud (*purpose*), sasaran (*abjective*), prinsip (*principle*), niat (*intent*), tujuan (*goal*), dan tujuan akhir (*end*). Sementara secara terminologi *Maqāshid syariah* didefinisikan sebagai makna-makna yang dituju oleh syari' untuk diwujudkan yang terdapat di balik ketentuan-ketentuan syariah dan hukum. *Maqāshid syariah* sebagai sebuah teori, metodologi, dan *terminus technicus*, baru muncul pada abad ke delapan hijriah, di tangan Imam Syatibi, dengan kitabnya *Al-Muwafaqat* disebut sebagai Bapak *Maqāshid*. Sebelumnya, kajian *Maqāshid* masih satu paket dengan kajian *al-maslahah al-mursalah*. Setidaknya ada tiga alasan Syatibi disebut sebagai Bapak *Maqāshid*: pertama, keberhasilan Syatibi menarik *Maqāshid* yang semula hanya sekadar *maslahah-maslahah* lepas menjadi asas-asas hukum. Kedua, dari 'hikmah di balik aturan' kepada dasar aturan. Ketiga, dari ketidaktentuan menuju keyakinan.³⁰

Dilihat dari cakupan bahwa *Maqāshid Syariah* terbagi kepada tiga yaitu

²⁹ Ibid.

³⁰ Hamka Husein Hasibuan, "*Jurnal Pemikiran Maqāshid Syariah*", Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, T.h, H. 12.

Maqāshid al-ūmmah, *Maqāshid al-khāssah* dan *Maqāshid al-juz'iyah*. *Maqāshid al-ūmmah* adalah berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum islam atau yang lebih dominan di mana terdapat di dalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar (*ghāyah al-kubrā*) yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan dan sebagainya.³¹

Maqāshid al-khāssah adalah tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam. Hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan criminal, larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis dan sebagainya. *Maqāshid al-juz'iyah* adalah bahwa tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ada dibalik hukum atau maksud di balik peraturan. Hal ini berkaitan dengan berbagai 'illah, hikmah dan rahasia suatu hukum. Contohnya tujuan hukum diperbolehkannya orang yang sakit tidak menjalankan ibadah puasa atau tujuan dari larangan menyimpan daging hewan kurban dan sebagainya.³²

Ketiga kategori *Maqāshid Syariah* di atas mesti dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bukan pula bersifat hirarki. Kesatuan kategori *Maqāshid Syariah* ini mesti pula dilihat dalam dimensi yang lebih luas, sebab dari hal ini adalah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dan menyelesaikan persoalan-

³¹ Abdul Helim, "*Maqāshid al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, H. 22.

³² *Ibid.*, H. 23.

persoalan kekinian.³³

Para ahli *Maqāshid* klasik mengklasifikasikan *Maqāshid* sesuai dengan jenjang kemaslahatannya menjadi tiga tingkat: *al-darūrīyyah* (primer; keniscayaan), *al-hājīyyah* (sekunder; kebutuhan), dan *al-tahsīnīyyah* (tersier; kemewahan). Kemudian, *al-darūrīyyah* dibagi lagi kepada: *hifz al-din* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al-‘aql* (pelestarian akal) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ahli menambahkan *hifz al-‘ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *al-maqāṣid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan. Dari ketiga kategori klasifikasi *Maqāshid* itu, hanya *al-dharuriyah* atau *al-hajiyah* yang bisa dijadikan bahan dan dasar untuk *istinbat al-ahkam*. Selain klasifikasi di atas, Abdul Majid an-Najjar membuat klasifikasi lain. Dilihat dari kekuatan sumber (*quwwah al-subut*) *Maqāshid* dibagi kepada: *al-maqhasid al-qat’iyyah*, *al-maqhasid al-zhanniyah*, *al-Maqāshid al-wahmiyah*; dari keasliannya (*bi hasab al-ashliyah*) menjadi: *Maqāshid al-ushul* dan *Maqāshid al-wasail*.³⁴

Akan tetapi, dengan perkembangan zaman dan terjadinya globalisasi di mana manusia bukan hanya warga lokal (*local citizen*), melainkan sudah menjadi warga dunia (*world citizen*), –mau tidak mau teori *Maqāshid* tradisional itu harus dikembangkan. Menurut Auda, setidaknya ada beberapa kritikan yang disajikan oleh para ahli teoritikus *Maqāshid* terhadap klasifikasi keniscayaan *Maqāshid*

³³ Ibid.

³⁴ Hamka Husein Hasibuan, “Jurnal Pemikiran *Maqāshid* Syariah..... H. 13.

tradisional, yaitu:

- a. Teori *Maqāshid* tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nash yang meliputi topik fiqih tertentu;
- b. *Maqāshid* tradisional masih berfokus di seputar individu, belum menyentuh ranah makro: keluarga, masyarakat, dan umat manusia;
- c. *Maqāshid* tradisional tidak memasuk nilai-nilai fundamental, seperti keadilan (*al-'adl*) dan kebebasan (*al-hurriyah*);
- d. *Maqāshid* tradisional masih deduksi dari kajian literatur fiqih, belum dari sumber-sumber syariat: Al-Quran dan Sunnah.³⁵

Dalam pandangan Jasser Auda, Pada abad ke-20 M para penulis *Maqāshid* secara signifikan mengembangkan perlindungan keturunan menjadi teori berorientasi keluarga. Ibn Asyur, misalnya, menjadikan peduli keluarga sebagai *Maqāshid* hukum islam. Dalam monografinya, *Usūl al-nizām al-Ijtimāi fi-al Islām* (dasar-dasar system social dalam Islam), Ibn Asyur mengkolaborasi *Maqāshid* yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Menilai kontribusi Ibn Asyur sebagai bagian dari reinterpretasi teori *hifz-un-nasli* maupun sebagai pengganti teori yang sama dengan bentuk yang baru, yang pasti adalah bahwa kontribusi Ibn Asyur membuka pintu bagi cendekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori *Maqāshid* dalam pelbagai cara baru.³⁶

Sama halnya, *hifzul-aqli* (perlindungan akal) yang hingga akhir-akhir ini

³⁵ Ibid.

³⁶ Jasser Auda, "*Membumikan Hukum Islam melalui Maqāshid Syariah*", Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015, H. 56-57.

masih terbatas pada maksud larangan minum minuman keras dalam Islam, sekarang sudah berkembang dengan memasukkan pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas *taklid*, dan mencegah mencegah tenaga ahli keluar negeri.³⁷

Demikian pula *hifzul-irdi* sudah menjadi konsep sentral dalam kebudayaan arab sejak periode pra-Islam. Syair pra-Islam, bertengkar dengan kabilah *dandam* terkait pencemaran kehormatannya. Dalam hadis, Nabi SAW, menjelaskan bahwa darah, harta, kehormatan setiap muslim adalah “haram”, yang tidak boleh dilanggar. Namun akhir-akhir ini, ungkapkan “perlindungan kehormatan” dalam hukum Islam secara berangsur-angsur diganti oleh “perlindungan harkat dan martabat manusia”, bahkan diganti oleh “perlindungan hak-hak asasi manusia” sebagai *Maqāshid* dalam hukum Islam.³⁸

Kesesuaian antara hak-hak asasi manusia (HAM) dengan Islam menjadi topik perdebatan hangat, baik dalam lingkup hukum Islam maupun internasional. Deklarasi hak-hak asasi manusia Islam Universal diproklamasikan pada tahun 1981 oleh sejumlah cendekiawan yang merepresentasikan entitas-entitas Islami yang beraneka-ragam di Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (UNESCO).³⁹

Didukung sejumlah nas Islam yang disebutkan dalam bagian referensi, deklarasi itu secara esensial memasukan seluruh daftar hak-hak asasi manusia

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid., H. 58.

yang disebutkan dalam deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR), seperti hak-hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, perlakuan adil, perlindungan dari penyiksaan, suaka, kebebasan berkeyakinan dan menyatakan pendapat, kebebasan bersekutu, Pendidikan dan kebebasan beraktivitas.⁴⁰

Akan tetapi, beberapa anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNHCHR) mengungkapkan kekhawatiran terhadap deklarasi Islam tentang hak-hak asasi manusia, karena berfikir bahwa hal itu sangat mengancam konsensus *intercultural* yang menjadi landasan bagi instrumen hak-hak asasi manusia. Beberapa anggota lain meyakini bahwa deklarasi Islam tersebut menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia karena, tidak seperti instrumen-instrumen internasional, hak-hak asasi manusia versi Islam dihubungkan dengan sumber wahyu sehingga menambah motivasi moral baru untuk mentaati hak-hak asasi manusia versi Islam tersebut.⁴¹

Pendekatan berbasis *Maqāshid* terhadap isu hak-hak asasi manusia mendukung pendapat kelompok terakhir, sambil memberikan perhatian terhadap pendapat kelompok pertama, khususnya jika istilah *Maqāshid* dikontemporesasi dan diberi peran lebih fundamental dalam penalaran hukum Islam. Topik hak-hak asasi manusia dan *Maqāshid* membutuhkan riset lebih lanjut dalam rangka memecahkan problem *inkonsistensi* yang ditegaskan oleh beberapa peneliti dalam

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

tataran aplikasi.⁴²

Dengan cara serupa, *hifzuddin* (perlindungan agama), dalam terminologi al-Gazali dan al-Syatibi, memiliki akar pada hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar versi al-Amiri. Namun akhir-akhir ini, teori yang sama untuk *Maqāshid* hukum Islam tersebut diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang sama sekali berbeda, yaitu “kebebasan kepercayaan” menurut istilah ibn Asyur, atau kebebasan berkeyakinan dalam ungkapan kontemporer lain. Para penganjur pandangan ini sering mengutip ayat Al-Qur’an: “*tidak ada paksaan dalam agama*” sebagai prinsip fundamental, dibandingkan memahaminya sebagaimana pandangan populer dan tidak akurat, yaitu menyerukan hukuman bagi kemurtadan (*had al-riddah*) yang kerap disebutkan dalam referensi-referensi tradisional dalam konteks *hifzuddin* atau perlindungan agama.

Terakhir, *hifzulmali* (perlindungan harta) versi al-Gazali Bersama dengan hukuman bagi pencurian versi al-Amiri dan proteksi uang versi al-Juwaini akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang familiar, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan *Maqāshid* untuk mendorong pembangunan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.⁴³

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid., H. 59.

Oleh sebab itu, struktur *Maqāshid* paling tepat dideskripsikan sebagai struktur multidimensional, di mana tingkatan keniscayaan, jangkauan hukum, jangkauan orang, dan tingkatan keumuman *Maqāshid* seluruhnya dilihat sebagai dimensi-dimensi valid yang mempresentasikan sudut pandang dan klasifikasi yang valid.⁴⁴

C. Konsep Penelitian

1. Pengertian *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart *Ratio Decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang.

Pada umumnya, fungsi *Ratio decidendi* atau legal reasoning, adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintahan terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replika dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum, dan lembaga peradilan.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, H. 40.

⁴⁵ Abraham Amos H.F, "*Legal Opinion Teoritis & Empirisme*", Jakarta PT Grafindo Persada, 2007, H. 34.

2. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi terdiri dari dua kata, yaitu mahkamah dan konstitusi. Mahkamah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengadilan dan dapat juga diartikan badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran.⁴⁶ Sedangkan konstitusi dapat diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya), serta dapat juga berarti undang-undang dasar suatu negara.⁴⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan suatu badan atau pengadilan untuk memutuskan hukum atas suatu perkara yang berkaitan dengan aturan ketatanegaraan atau yang bersangkutan dengan Undang-Undang Dasar.

a. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa fungsi yaitu: mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara dan Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi.⁴⁸ Fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu: “Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen

⁴⁶ Pranala, <https://kbbi.web.id/mahkamah>, di akses pada tanggal 15 Maret 2019, pukul 19.00 WIB.

⁴⁷ Pranala, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/konstitusi.html>, di akses pada tanggal 15 Maret 2019, pukul 19.00 WIB.

⁴⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, H. 7.

negara secara konstituen dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar *spirit* konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.⁴⁹

Lembaga negara lain dan bahkan orang per orang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi karena memang tidak selalu jelas dan rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Tafsiran yang mengikat tersebut hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian yang diajukan kepadanya.⁵⁰

b. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

⁴⁹ *Ibid.*, H. 8.

⁵⁰ *Ibid.*

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Knstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:⁵¹

- 1) Kewenangan menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;⁵²
- 2) Kewenangan memutus sengketa lembaga negara;⁵³
- 3) Kewenangan memutus pembubaran partai politik;⁵⁴
- 4) Kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;⁵⁵
- 5) Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁵⁶

3. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat

⁵¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, , H. 11.

⁵² Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi memahami keberadaannya dalam system ketatanegaraan republic Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, H. 31.

⁵³ *Ibid.*, H. 33.

⁵⁴ *Ibid.*, H. 37.

⁵⁵ *Ibid.*, H. 38.

⁵⁶ *Ibid.*, H. 39.

secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.⁵⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.⁵⁸

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara, yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.

Kekuatan pembuktian bahwa hakim tidak boleh lagi memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputus, sebagaimana disebut dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.⁵⁹

Kekuatan eksekutorial Mahkamah Konstitusi adalah putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi telah dianggap terwujud dengan pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara

⁵⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, H.201.

⁵⁸ *Ibid.*, H. 214.

⁵⁹ *Ibid.*, H. 215.

⁶⁰ *Ibid.*, H. 216.

sebagaimana diperintahkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.⁶¹

Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi: “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁶²

Ini berarti, bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

4. Pengertian Fiqih *Siyāsah*

Istilah *fiqih siyāsah* terdiri dari dua kata, yakni *fiqih* dan *siyāsah*. Agar diperoleh pemahaman yang tepat, perlu dijelaskan pengertian tiap-tiap kata dari segi kata istilah. Kata *fiqih* secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum Islam atau yurisprudensi Islam. Secara etimologi, *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam

⁶¹ *Ibid.*, H. 214.

⁶² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, H. 219.

terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁶³ Sedangkan *siyāsah* secara terminologis, dalam *Lisan Al-‘Arab*, *siyāsah* diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa keMashlahatan. *siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.⁶⁴

Menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.⁶⁵ Dari definisi *siyāsah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan *siyāsah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyāsah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyāsah* yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, *siyāsah* itu dalam wilayah *ijtihadi*, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil *qath'i* dari Al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah

⁶³ Juhaya S. Paradja, "*Fiqh Siyasa*", Bandung: CV Pustaka Setia, Januari 2015, H. 13.

⁶⁴ *Ibid.*, H. 26.

⁶⁵ Wahbah zuhaili. "*Ushul Fiqh*". *kuliyat da'wah al Islami*", Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997, H. 89.

ijtihadi maka dalam *siyāsah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyāsah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al- Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.⁶⁶

Adapun *siyāsah Syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁶⁷

5. Pemahaman Tentang Orang Dalam Gangguan Jiwa

Pemahaman tentang jiwa manusia secara mitologis dan religius, yang berfokus pada rohani manusia (yaitu hubungan dengan Tuhan), masih bertahan hingga hari ini. Para filsuf cenderung lebih banyak memusatkan wawasan psikologis mereka pada jiwa daripada rohani atau raga. “*Jiwa*” atau “*soul*” biasanya merupakan sinonim bagi “*pikiran*” atau “*mind*”, yang sering mencakup aspek-aspek rohani juga.⁶⁸

⁶⁶ A.Djazuli, “*Fiqh Siyāsah Edisi Revisi*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, H 29.

⁶⁷ Abdul Wahab Khalaf, “*Ilmu Ushul Fiqih*”, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, H. 123.

⁶⁸ Stephen Palmquist, “*Fondasi Psikologi Perkembangan*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, H. 59-60.

Gangguan jiwa adalah gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi jiwa. Gangguan jiwa adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi (penangkapan panca indera). Gangguan jiwa ini menimbulkan stress dan penderitaan bagi orang dengan gangguan jiwa (dan keluarganya).⁶⁹

Gangguan jiwa dapat mengenai setiap orang, tanpa mengenal umur, ras, agama, maupun status sosial-ekonomi. Gangguan jiwa bukan disebabkan oleh kelemahan pribadi. Di masyarakat banyak beredar kepercayaan atau mitos yang salah mengenai gangguan jiwa, ada yang percaya bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh gangguan roh jahat, ada yang menuduh bahwa itu akibat guna-guna, karena kutukan atau hukuman atas dosanya. Kepercayaan yang salah ini hanya akan merugikan orang dengan gangguan jiwa dan keluarganya karena orang gangguan jiwa tidak mendapat pengobatan secara cepat dan tepat.⁷⁰

Gangguan jiwa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu: gangguan jiwa ringan (Neurosa) dan gangguan jiwa berat (Psikosis).

- 1) Gangguan jiwa berat (Psikosis) adalah bentuk gangguan jiwa yang merupakan ketidakmampuan untuk berkomunikasi atau mengenali realitas yang menimbulkan kesukaran dalam kemampuan seseorang berperan sebagaimana mestinya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu gejala psikosis yang dialami penderita gangguan jiwa berupa gangguan persepsi dimana pasien

⁶⁹ Megasari Devi Kurnilla, Karya Tulis Ilmiah, *"Tingkat Stress Pada Caregiver Pasien Gangguan Jiwa Psikotik"*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2016, H. 8.

⁷⁰ Ibid.

mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Dua jenis yaitu psikosis organik, dimana didapatkan kelainan pada otak dan psikosis fungsional dimana tidak terdapat kelainan pada otak.

- 2) Gangguan jiwa ringan (Neurosa) merupakan gangguan dimana seseorang dalam keadaan sadar, dengan melalui ketidakberesan tingkah laku yang disebabkan oleh adanya tekanan yang terus menerus seperti konflik yang ditandai dengan gejala-gejala seperti: reaksi kecemasan, kerusakan aspek-aspek kepribadian, phobia, histeris. Gangguan jiwa ringan adalah suatu bentuk dimana perilaku seseorang yang maladaptif karena adanya faktor penyebab yang mendasar. Mengetahui bahwa jiwanya terganggu. Faktor penyebab gangguan jiwa ringan adalah: tekanan sosial yang dapat menyebabkan ketakutan dengan kecemasan dan ketegangan hingga kronis, banyak mengalami frustrasi yang dialami sejak lama, kepribadian yang sangat labil.⁷¹

a) Skizofrenia

Skizofrenia adalah gangguan psikologis yang parah yang dicirikan oleh adanya proses-proses berfikir yang terganggu. Skizofrenia tidak sama dengan gangguan identitas disosiasi. Skizofrenia melibatkan pecahnya kepribadian individu dari realitas dan bukan munculnya beberapa kepribadian dalam satu individu. Individu dengan skizofrenia mungkin menunjukkan serangkaian luas gejala, termasuk pikiran yang terganggu,

⁷¹ RE Karsanti, *"Tingkatan Gangguan Jiwa"*, Salatiga: Universitas Kristen Setya Wacana, Tanpa Tahun, H. 11-12.

komunikasi yang ganjil, emosi yang tidak tepat, dan penarikan diri.⁷²

Gangguan Skizofrenia berkembang secara perlahan-lahan dan tersembunyi. Ciri-ciri umumnya meliputi: sifat menyendiri, hilangnya perhatian terhadap dunia sekitar secara bertahap, melamun secara berlebihan, emosi yang menumpul, dan tingkah laku yang tak sesuai.⁷³

b) Skizoafektif

Gangguan Skizoafektif prognosis ini mirip dengan prognosis skizofrenia bahwa individu-individu cenderung tidak menjadi lebih baik dan mungkin untuk melanjutkan kehidupan utama mereka akan mengalami kesulitan-kesulitan selama beberapa tahun. Kriteria DSM-IV-TR untuk gangguan skizofrenia menyebutkan bahwa harus ada gangguan suasana perasaan yang disertai delusi atau halusinasi selama kurang lebih dua minggu dalam ketiadaan gejala-gejala suasana perasaan yang menonjol.⁷⁴

c) Depresi Berat dan Halusinasi

Depresi Berat (Major Depression) melibatkan perubahan emosi, perilaku, kognitif, dan fisik yang cukup berat sehingga mengganggu kehidupan seseorang setidaknya selama dua minggu. Beberapa episode depresi berat

⁷² Laura A. King, "*Psikologi Umum*", Jakarta: Salemba Humanika, 2007, H.328.

⁷³ Alex Sobur, "*Psikologi Umum*", Bandung: CV SETIA PUSTAKA, 2003, H 350.

⁷⁴ V. Mark Durand Dkk, "*Intisari Psikologi Abnormal*", Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2007, H.240.

dapat berlangsung selama 20 Minggu, mereda, dan terulang kembali.

Penderita depresi berat merasa putus asa berlebihan dan tidak berharga.⁷⁵

d) Bipolar

Gangguan bipolar adalah gangguan suasana hati yang dicirikan oleh perubahan suasana hati yang ekstrem yang mencakup satu atau lebih episode mania (keadaan terlalu bersemangat, optimis yang tidak realistis).

Bipolar berarti orang tersebut mungkin mengalami baik depresi dan mania.

Kebanyakan individu dengan gangguan bipolar mengalami siklus berulang dari depresi yang bergantian dengan mania.⁷⁶

e) Amnesia dan Fugu Disosiasi Amnesia adalah ketidakmampuan untuk mengingat kembali kejadian-kejadian penting. Amnesia dapat terjadi sebagai akibat benturan pada kepala, menghasilkan trauma di otak. Namun Amnesia disosiasi adalah gangguan disosiasi yang ditandai oleh kehilangan ingatan yang ekstrem sebagai akibat stress psikologis berkepanjangan. Sedangkan Fugu Disosiasi adalah gangguan disosiasi di mana individu tidak hanya mengembangkan amnesia, tetapi juga pergi secara tidak diduga jauh dari rumah dan mengembangkan identitas baru.⁷⁷

f) Kecemasan

Sebagai pengalaman psikis yang biasa dan wajar, yang pernah dialami oleh setiap orang dalam rangka memacu individu untuk mengatasi

⁷⁵ Carole Wade dkk, "*PSIKOLOGI*", Jakarta: PENERBIT ERLANGGA, 2014, H.264.

⁷⁶ Laura A. King, "*Psikologi Umum*"....., H.312.

⁷⁷ *Ibid.*, H 325.

masalah yang dihadapi sebaik-baiknya. Suatu keadaan seseorang merasa khawatir dan takut sebagai bentuk reaksi dari ancaman yang tidak spesifik. Penyebab maupun sumbernya biasa tidak diketahui atau tidak dikenali. Intensitas kecemasan dibedakan dari kecemasan tingkat ringan sampai tingkat berat. Mengidentifikasi rentang respon kecemasan ke dalam empat tingkatan yang meliputi, kecemasan ringan, sedang, berat dan kecemasan panic.⁷⁸

6. Hal-hal yang mempengaruhi kecakapan berbuat hukum ('*Awaridh*)

Dalam membicarakan subjek hukum telah dijelaskan bahwa di antara syarat subjek hukum adalah kecakapan untuk memikul beban hukum, yaitu kemampuan dikenai hukum dan kemampuan berbuat hukum. Kecakapan dikenai hukum atau *ahliyah al-wujub* berlaku untuk seseorang dalam kepastiannya sebagai manusia. Dalam *Awaridh Samawiyah* terdiri dari beberapa macam dan hukum yang berlaku padanya berbeda menurut bentuknya.⁷⁹

Gila ialah kelainan yang terdapat pada akal yang menghalangi ucapan dan perbuatan seseorang menurut semestinya. Bila pada orang yang waras ucapannya dan perbuatannya adalah atas kehendak akal, maka ucapan atau perbuatan orang gila tidak menurut akal.⁸⁰

Gila yang berketerusan menggugurkan diri dari beban hukum sejauh yang menyangkut kewajiban fisik seperti shalat, puasa, *kaffarah*, dan lainnya; karena

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Amir Syarifudin, "*Ushul Fiqh*", Jakarta: Prenada Media Group, 2009, H. 435.

⁸⁰ Ibid., H. 436.

pelaksanaan dari kewajiban ini memerlukan niat, sedangkan niat orang gila tidak diperhitungkan. Dalam kewajiban menyangkut harta benda, ia tidak bebas dari hukum selama gila itu. Kewajiban yang harus dilakukannya akan ditunaikan dari hartanya oleh orang lain; seperti ganti rugi dari kejahatan yang dilakukannya terhadap harta orang lain.⁸¹

Gila yang tidak memanjang (*ghair muabbad*), yaitu gila yang dalam sewaktu waktu dan dalam waktu yang tidak lama. Mengenai hukum yang berlaku terhadap gila yang tidak memanjang ini berbeda dengan hukum yang berlaku pada orang gila yang memanjang. Gila dalam bentuk ini ada yang merupakan penyakit bawaan dan ada yang muncul mendadak pada seseorang.⁸²

Adapun beban hukum terhadap gila yang tidak berketerusan tetapi bersifat bawaan asli, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Menurut Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani (murid Imam Abu Hanifah), hukumnya disamakan dengan gila yang berketerusan yang menggugurkan semua beban hukum yang berbentuk fisik. Alasannya, karena gugurnya beban hukum dikaitkan kepada salah satu di antara waktunya yang memanjang atau berketerusan dan sifat bawaan. Sedangkan menurut Abu Yusuf (juga murid dan pengikut Abu Hanifah) berpendapat bahwa gila bawaan disamakan dengan sifat

⁸¹ Ibid

⁸² Ibid., H. 437.

gila mendadak yang tidak menggugurkan beban hukum. Alasannya karena gugurnya beban hukum hanya dikaitkan kepada waktu lama yang memanjang.⁸³

7. Subjek Hukum dan Cakap Hukum

a. Subjek Hukum

Hukum mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan antara subyek hukum. Pengertian Subyek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.⁸⁴

Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam lapangan hukum perdata mengenal subyek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subyek hukum adalah konsep dan pengertian (*concept en begriff*) yang mendasar.⁸⁵

Pasal 1329 BW mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain. Karena membuat perjanjian adalah tindakan yang paling umum dilakukan oleh anggota masyarakat maka dari ketentuan tersebut bisa ditafsirkan bahwa

⁸³ *Ibid.*, H. 438.

⁸⁴ Kansil, C.T.S. *et al*, "Modul Hukum Perdata", Jakarta, Pradnya Paramita, 1995, H. 84.

⁸⁵ Rosnidar Sembiring, "Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, H. 7.

semua orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain.⁸⁶

Untuk itu, person dalam hukum perlu diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, yang disebut kecakapan bertindak. Tindakan Hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh pihak yang melakukan tindakan hukum yang bersangkutan.⁸⁷

b. Cakap Hukum

Setiap penyanggah hak dan kewajiban tidak selalu berarti mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Pada umumnya sekalipun setiap orang mempunyai kewenangan hukum, tetapi ada golongan orang yang yang dianggap tidak cakap melaksanakan beberapa hak atau kewajiban. Subyek hukum orang yang pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum dan dianggap cakap bertindak sendiri tetapi, ada subyek hukum yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri. Hal merupakan anggapan hukum yang memungkinkan adanya bukti lawan. Golongan orang yang tidak cakap bertindak disebut *personae miserabile*.⁸⁸

Pasal 1330 KUH Perdata mengemukakan tentang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ialah Orang-orang yang belum dewasa dan orang

⁸⁶ J. Satrio, “Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, H. 29.

⁸⁷ Herlien Budiono, “Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, H. 113.

⁸⁸ Rachmadi Usman, “Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia”, Jakarta, Sinar Grafika, 2006 H. 83.

yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*). Kedewasaan seseorang menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sehingga kedewasaan seseorang menurut hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Penjelasan dari Pasal 1330 KUH Perdata tentang orang yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu:⁸⁹

- 1) Orang-orang yang belum dewasa atau belum cukup umur, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun atau tidak lebih dahulu melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 KUH Perdata *junto* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan kurang ingatan, sakit jiwa (orang gila), mata gelap, dan pemboros (433 KUH Perdata). Hal ini terjadi dikarenakan gangguan jiwa seperti sakit saraf dan gila menyebabkan perbuatannya menjadi tidak normal. Kemudian pemabuk atau pemboros mengakibatkan perbuatan orang tersebut merugikan dan menelantarkan keluarga dan anak-anak dalam kehidupan, pendidikan, dan lain-lain.⁹⁰

Pengampuan dalam Bahasa Indonesia merupakan kata yang terbentuk dari kata dasar ampu yang mendapat tambahan awalan (pe) dan akhiran (an).

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Kansil, C.T.S. *et al*, “Modul Hukum Perdata”, H. 87.

Kata ampu berarti orang yang menjaga keselamatan orang lain; wali, orang tua, pembimbing. Pengampuan adalah perwalian terhadap seseorang yang telah dewasa yang disebabkan karena gila, terlalu boros, dungu.⁹¹

Berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata, setiap orang dewasa yang menderita rasa sakit ingatan, boros, dungu dan mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan. Kepentingan orang dewasa yang berada dibawah pengampuan harus diurus oleh wali pengampunya.⁹² Menurut J. Satrio, pengampuan adalah suatu keadaan dimana orang dewasa kedudukan hukumnya diturunkan menjadi sama dengan orang yang belum dewasa, dengan konsekuensi kewenangan untuk bertindak dicabut.⁹³ Menurut Kansil bahwa pengampuan adalah bimbingan yang dilaksanakan oleh *curator* yaitu keluarga sedarah atau orang yang ditunjuk terhadap orang-orang dewasa yang karena sesuatu sebab dinyatakan tidak cakap bertindak di dalam lalu lintas hukum.⁹⁴

D. Kerangka Pikir, Denah Penelitian dan Fokus Penelitian

1. Kerangka Pikir

Penelitian ini berawal dari fenomena sosial banyaknya masyarakat yang berkomentar mengenai bolehnya orang dalam gangguan jiwa untuk memilih pemimpin bangsa Indonesia saat ini, masyarakat banyak yang bertanya-tanya

⁹¹ Tim Redaksi Kamus Pusat Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, H. 40.

⁹² Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perdata Indonesia*”, Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 2010. H. 38.

⁹³ J. Satrio, “*Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*” , H. 74.

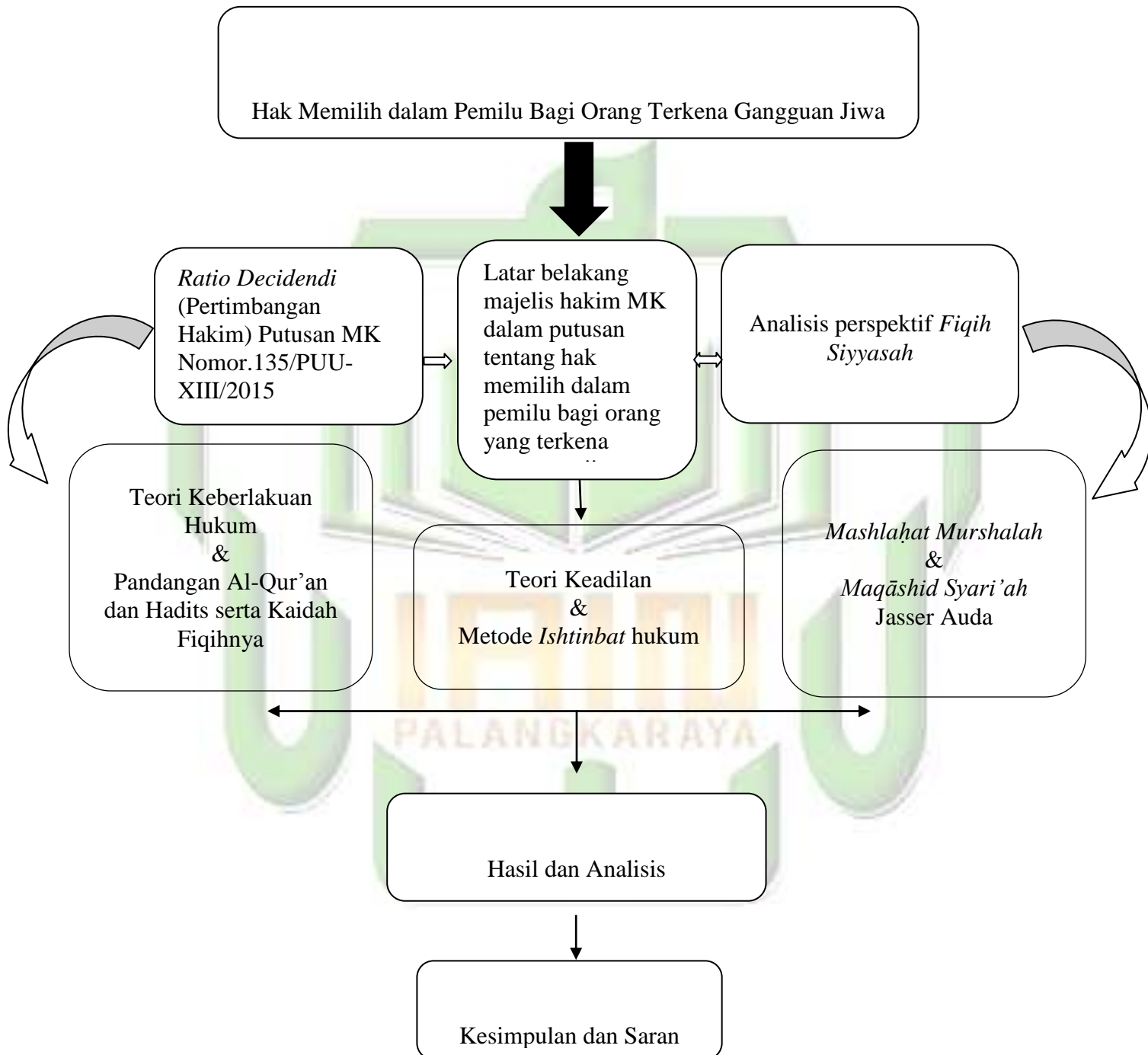
⁹⁴ Kansil, C.T.S. *et al*, “*Modul Hukum Perdata*” , H. 138.

apakah mungkin orang dalam gangguan jiwa yang berkeluyuran di jalan diperbolehkan mencoblos? Memikirkan dirinya sendiri saja tidak bisa apalagi memilih pemimpin yang amanah, adil dan mensejahterakan rakyat tutur salah satu masyarakat. Dalam hal ini dibantah langsung oleh salah satu dari KPU bahwasanya hal tersebut tidak dibenarkan, orang yang dalam gangguan jiwa yang diperbolehkan untuk mencoblos yaitu orang gangguan jiwa dengan memiliki surat dari dokter di rumah sakit jiwa, ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang hak memilih dalam pemilu orang dalam gangguan jiwa dengan latar belakang putusan tersebut beberapa LSM yang mengajukan gugatang tersebut diantaranya yaitu Perhimpun Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Khoirunnisa Nur Agustyati, bahwasanya hal ini berawal dari presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengerlurkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pascadisahkan langsung direvisi atas inisiatif DPR yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015. Hasil revisi tersebut menghasilkan ketentuan pasal 57 ayat (3) huruf a bahwa salah satu persyaratan warga Negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang sedang "*Terganggu Jiwa dan Ingatannya*" ketentuan ini sangat potensial akan menghilangkan hak seseorang warga Negara untuk terdaftar sebagai pemilih dan memberikan hak

suaranya didalam penyelenggara pilkada. Ketentuan ini sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci, apa kualifikasi yang jelas untuk seorang yang disebut “sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Oleh sebab itu, ketentuan di dalam Pasal ini telah membuat Negara tidak memperlakukan secara sama setiap warga negaranya di dalam suatu aktivitas penyelenggaraan Negara. Selain itu, ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a sepanjang frasa “*tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya*” juga telah menghilangkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara di hadapan hukum yang mestinya dipenuhi oleh Negara. Dalam hal ini peneliti mengemukakan pandangan yang berbeda dalam beberapa macam perspektif yang di tinjau dalam hukum positif dan hukum Islam, Karena pada dasarnya melihat suatu hukum tidak hanya pada suatu sudut pandang saja akan tetapi beberapa teori dan kajian hukum lainnya, sehingga kajian yang di hasilkan membuat suatu kepastian hukum.

2. Denah Penelitian

Kerangka Pikir



3. Fokus Penelitian

Berdasarkan denah kerangka tersebut maka fokus yang digali dan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana latar belakang majelis hakim MK dalam putusan tentang hak memilih dalam pemilu bagi orang yang terkena gangguan jiwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XIII-2015. Yang dikehendaki dari fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengujian Putusan MK No. 135 /PUU-XII/2015 mengenai dasar-dasar putusan tersebut.
 - 2) Pandangan Al-Qur'an dan Hadis terhadap putusan MK No 135/PUU-XII/2015.
 - 3) putusan MK No 135/PUU-XII/2015 ditinjau dari aspek kaidah Fiqih.
- b. *Rasio Decidendi* (Pertimbangan Hakim) dalam putusan MK dan analisis perspektif *Fiqh Siyyasah* Yang dikehendaki dari fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Pertimbangan hakim dalam suatu putusan dengan ditinjau beberapa aspek Hukum dan normatif sosiologis.
 - 2) Analisi putusan Mahkamah Konstitusi tentang orang dalam gangguan jiwa dalam pandangan perspektif Fikih *siyāsah*.
 - 3) Analisi putusan Mahkamah Konstitusi tentang orang dalam gangguan jiwa dalam pandangan perspektif *Mashlahat Mursalah* dan *Maqāshid Syariah* Jasser Auda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya tulis ilmiah harus memiliki kebenaran. Kebenaran ilmiah harus dapat dilihat dari sisi bahwa ia sesuai dengan fakta dan aturan, objektif, masuk akal dan memiliki asumsi-asumsi.⁹⁵ Oleh karena itu, kebenaran ilmiah harus sesuai dengan aturan, yang hal ini berarti harus memiliki metode. Dalam tahapan ini, metode memiliki peran penting dalam sebuah karya ilmiah. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu,⁹⁶ sehingga dapat dikatakan bahwa setiap karya ilmiah dalam bentuk penelitian selalu menggunakan metode. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode normatif, teori hukum normatif adalah yaitu telaah kepustakaan dengan menemukan asas dan doktrin hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, mengkaji sebuah undang-undang atau putusan hakim dan menemukan hukum untuk suatu perkara *in concreto*.⁹⁷

Teori dari ilmu hukum normatif dapat diidentifikasi karakteristik teori hukum normatif, yakni: (1) memberikan landasan teoritis bagi berlakunya norma hukum yang deskripsi dan depreskripsi oleh ilmu hukum normatif; (2) norma hukum merupakan fokus kajiannya sebagaimana juga fokus kajian ilmu hukum

⁹⁵Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet.13, H. 5.

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷ Suratman Dkk, *"Metode Penelitian Hukum"*, Bandung: Alfabeta, 2015, H. 54.

normative termasuk metode penelitian hukum normatif; (3) posisi sudut pandang berdirinya teoritis hukum adalah dari sudut internal norma (*from the within*) yang bersifat mengharuskan (*the ought*), namun terkadang juga melihat gejala eksternal norma dalam penerapan hukum sebagai umpan balik untuk menyempurnakan sudut pandang internalnya.⁹⁸

B. Pendekatan Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini bisa disebut penelitian Eksplanatoris yaitu suatu penelitian untuk menerangkan, memperkuat atau menguji suatu ketentuan hukum.⁹⁹ Penelitian hukum dibedakan menjadi 2 yaitu: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.¹⁰⁰ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.¹⁰¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini merupakan termasuk penelitian hukum normatif karena peneliti melakukan penelitian terhadap data sekunder.

Suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*conceptual*

⁹⁸ I Made Pasek Diantha, "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*", Jakarta: KENCANA, 2016, H 88.

⁹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, H. 9.

¹⁰⁰ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, H. 310.

¹⁰¹ Ibid.

approach), Pendekatan Analitis (*analytical approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*).¹⁰²

Pendekatan yang digunakan dan relevan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konsep (*conceptual approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu dalam pendekatan kasus berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.¹⁰³

¹⁰² Jonaedi Efendi Dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, H. 131.

¹⁰³ *Ibid.*, H. 132.

C. Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan penelitian sebagai berikut:

No.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			
		MARET 2019 – MEI 2019	MEI 2019- AGUSTUS 2019	AGUSTUS - SEPTEMBER 2019	SEPTEMBER- OKTOBER 2019
1.	Perencanaan, Pengajuan Judul s/d Seminar Proposal				
2.	Pengumpulan dan Analisis Data				
3.	Bimbingan Skripsi				
4.	Pelaporan Hasil Penelitian				
5.	Ujian Skripsi				

Berdasarkan matriks kegiatan penelitian di atas, tahapan kegiatan terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan yang terdiri dari pengajuan judul sampai dengan seminar proposal, analisis data, bimbingan skripsi dan pelaporan hasil penelitian yang dipertanggung jawabkan pada akhir bulan Oktober.

D. Jenis dan Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁰⁴ Dalam hal ini tinjauan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dengan beberapa aspek hukum seperti subjek hukum dan perspektif Fikih *siyāsah*, maka bahan hukum yang digunakan lebih merupakan data pustaka, Dengan menggunakan dokumen yang berupa referensi buku-buku, jurnal dan artikel yang mempunyai relevansi dengan kajian penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi

¹⁰⁴ Dyah Ochtorina Susanti Dkk, “*Penelitian Hukum (Legal Research)*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, H. 48.

menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum Negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi Negara lain).¹⁰⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dan Undang-Undang berkaitan dengan Hak Memilih.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber kedua. Adapun yang bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, karya ilmiah atau kajian-kajian hukum yang membahas tentang Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu putusan, membahas tentang Orang dalam gangguan jiwa, beberapa aspek subjek hukum, dan beberapa teori hukum yang berkaitan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian memerlukan bahan hukum yang lengkap agar bahan hukum yang terkumpul benar-benar memiliki validitas yang cukup tinggi. Di dalam suatu penelitian pengumpulan bahan hukum yaitu bahan pustaka,

¹⁰⁵ *Ibid.*, H. 52.

Dokumentasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, dan beberapa teori kajian lainnya. Adapun pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: Bahan Pustaka Teknik pengumpulan bahan hukum dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research*. Riset kepustakaan memiliki arti lebih dari sekedar langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian guna memperoleh informasi penelitian sejenis dan memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologi riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁰⁶ Hal ini dilakukan dengan maksud memperoleh bahan hukum sekunder dengan cara membaca dan mengutip bahan hukum yang ada kaitannya dengan pokok-pokok bahasan berupa literatur- literatur hukum, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan.

F. Pengolahan Data

Penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis

¹⁰⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, H. 2.

tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa.¹⁰⁷ Adapun analisis bahan yang dilakukan setelah adanya pengumpulan, klarifikasi dan menelaah bahan yang ada, maka bahan hukum dalam penelitian tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan teori yang ada.

G. Metode Analisis Data

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan, dan mengelompokkan, memberikan kode, serta mengkategorikan.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa tapi kata-kata verbal. Penelitian kualitatif juga suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁰⁸ Penelitian kualitatif memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:

1. Bersifat induktif yaitu berdasar pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis bersifat umum.

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, H. 251.

¹⁰⁸ Suteki Dkk, *"METODE PENELITIAN HUKUM (Filsafat, Teori Dan Praktek)"*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018, H. 139

2. Melihat pada *setting* dan manusia sebagai satu kesatuan, yaitu mempelajari manusia dalam konteks dan situasi di mana mereka berada.
3. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri (sudut pandang yang diteliti).
4. Lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian.
5. Semua aspek kehidupan sosial dan manusia dianggap berharga dan penting untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik.¹⁰⁹



¹⁰⁹ *Ibid.*, H. 140.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 135/PUU-XIII/2015

Pandangan peneliti Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 berawal dari sebuah gugatan dari beberapa LSM dan masyarakat terkait dengan hak konstitusi Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, disahkannya melalui usulan dari DPR. Hasil revisi tersebut di atas menghasilkan ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a bahwa salah satu persyaratan warga negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang sedang “*tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya*”. Ketentuan ini sangat potensial akan menghilangkan hak seorang warga negara untuk terdaftar sebagai pemilih dan memberikan hak suaranya di dalam penyelenggaraan Pilkada.

Dalam hal ini peneliti menyebutkan Ketentuan ini sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci, apa kualifikasi yang jelas untuk seorang yang disebut “*sedang terganggu jiwa/ingatannya*”. Oleh sebab itu, ketentuan di dalam Pasal ini telah membuat negara tidak memperlakukan secara sama setiap warga negaranya di dalam suatu aktivitas penyelenggaraan negara. Selain itu, ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a sepanjang frasa “*tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya*” juga telah menghilangkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara di hadapan hukum yang mestinya dipenuhi oleh negara.

Selain itu, peneliti mengungkapkan di dalam ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, sama sekali tidak memberikan prasyarat untuk seorang warga negara dapat di daftar sebagai pemilih *“tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”*. Begitu juga di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan, ketika penyelenggaraan Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoba membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di beberapa daerah. Atas dasar itu, pengujian konstiusionalitas ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a ini menjadi sangat penting untuk menyelamatkan hak memilih setiap warga negara untuk tetap didaftar dan dapat memberikan suara di dalam penyelenggaraan Pilkada nantinya.

Dalam hal ini peneliti berpandangan bahwasanya ketentuan pasal 57 ayat (3) huruf a sebagai pemilih adalah *“orang yang sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya”*, hal yang demikian dari tersebut kata ini dimaknai bersifat luas atau *Universal* dikalangan masyarakat luas, dari kata tersebut dapat menimbulkan hilangnya sebagian hak konstiusional warga negara orang dalam gangguan jiwa ringan atau dalam tahap penyembuhan. Pasal tersebut juga dapat berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi beberapa penderita gangguan jiwa ringan karena dinilai menghilangkan hak memilih ditengah masyarakat awam.

Peneliti mengaitkan dengan teori keberlakuan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Dalam tinjaunya secara yuridis putusan tersebut sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 yang termuat dalam pasal 27 dan pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu juga dari segi tinjaun sosiologisnya putusan tersebut dapat diterima masyarakat walaupun sebagian masyarakat belum memahami makna dalam putusan tersebut, masyarakat menilai bahwasanya orang dalam gangguan jiwa boleh memilih dalam pemilu secara keseluruhan, orang gangguan jiwa yang berkeluyuran di jalan boleh memilih padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 135/PUU-XIII/2015. Sepanjang frasa terganggu jiwa /ingatannya tidak dimaknai secara keseluruhan, orang gangguan jiwa ringan dan dianggap memenuhi syarat menurut dokter ahli kejiwaan boleh untuk memilih. Dalam tinjauan filosofisnya putusan tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai yang dianut dalam pergaulan hidup masyarakat dengan orientasi kepada kedamaian dan keadilan, karena putusan tersebut lebih mengedepankan aspek keadilan atau kesamaan hak antara masyarakat awam dengan orang dalam gangguan jiwa yang sifatnya sementara atau disebut dengan disabilitas mental.

Ada beberapa argumentasi dari para pemohon dalam putusan ini sebagai berikut:

1. *Bahwa dalam penyelenggaraan dan persiapan Pemilu 2014, KPU sebagai penyelenggara Pemilu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 395/KPU/V/2014 tertanggal 6 Mei 2014 (bukti P-3), pada poin 3 (tiga), menyebutkan, “KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS di rumah sakit jiwa, panti sosial dan pelabuhan udara internasional khusus pegawai yang bertugas dengan cara*

mendaftarkan pemilih tersebut ke dalam Daftar Pemilih Tetap dengan memerhatikan kesiapan dan ketersediaan petugas menjadi anggota KPPS serta efektifitas dan efesiensi dari segi anggaran”

2. *Bahwa dengan adanya prasyarat di dalam Undang-Undang a quo untuk seorang warga negara yang akan didaftar sebagai pemilih, telah membuat suatu perlakuan yang diskriminatif, tidak adil, dan menghilangkan dengan begitu dini hak memilih seorang warga negara untuk dapat berpartisipasi di dalam memilih calon kepala daerahnya, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya pada tahapan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih.*
3. *Bahwa ketentuan di dalam pasal a quo akan memperkuat stigma terhadap penderita gangguan jiwa yang merupakan masalah penting dalam upaya pengobatan penderita. Stigma (kesan negatif yang keliru) bahwa penderita gangguan jiwa tidak bisa disembuhkan dan tidak memiliki akal sehat, yang diperkuat oleh pasal a quo adalah keliru mengingat faktanya banyak penderita yang bisa sembuh dan mampu bekerja dan hidup di tengah masyarakat. Stigma dapat membuat penderita mengalami berbagai perilaku yang merugikan, misalnya mengalami diskriminasi dan disingkirkan dalam kehidupan sosial sekaligus Keadaan yang merugikan ini akan mempersulit proses penyembuhan dan rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa.*
4. *Bahwa sikap menghormati martabat penderita gangguan jiwa dengan menjamin dan memberikan kesempatan penderita berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dengan mengikuti Pemilu/Pilkada, akan meningkatkan rasa diterima oleh masyarakat dan meningkatkan percaya diri penderita, dan tentu proses penyembuhan dan rehabilitasi penderita menjadi lebih baik.*
5. *Bahwa dengan adanya ketentuan pasal a quo telah tidak sejalan dengan upaya penanggulangan masalah kesehatan jiwa oleh Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, “bahwa upaya promotif kesehatan jiwa ditunjukkan untuk salah satunya adalah menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi orang dengan gangguan jiwa sebagai bagian dari masyarakat”;*
6. *Bahwa adanya ketentuan dan anggapan orang yang tidak cakap bagi seorang dengan gangguan jiwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 1330 KUH Perdata, bukanlah sesuatu yang bisa menjadi dasar untuk menjadikan orang dengan gangguan jiwa bisa didaftar sebagai pemilih;*
7. *Bahwa jika merujuk KUH Perdata perihal orang dalam pengampunan, mesti melihat proses yang begitu panjang dan sistematis di dalam ketentuan KUH Perdata; Adapun gambaran prosesnya adalah sebagai berikut:*

Pasal 433 KUH Perdata mengatur “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya; Kemudian Pasal 436 KUH Perdata mengatur menyatakan bahwa “semua permintaan untuk

pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan”;

Pasal 437. *“Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan. dengan buktibukti dan penyebutan saksi-saksinya”*

Pasal 438. *“Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda”*

Pasal 439. *“Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan. Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan itu diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dan anggota-anggota keluarga sedarah”*

Pasal 440. *“Bila Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, berpendapat bahwa telah cukup keterangan yang diperoleh, maka Pengadilan dapat memberi keputusan tentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal yang sebaliknya, Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas”*

Pasal 442. *“Putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan berdasarkan kesimpulan Jaksa.”*

Pasal 443. *“Bila dimohonkan banding, maka Hakim banding sekiranya ada alasan, dapat mendengar lagi atau menyuruh mendengar lagi orang yang dimintakan pengampuan”* Pasal 444. *“Semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, dalam waktu yang ditetapkan dalam penetapan atau keputusan ini, harus diberitahukan oleh pihak yang memintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara; semuanya atas ancaman hukuman membayar segala biaya, kerugian dan bunga sekiranya ada alasan untuk itu”*

Pasal 449. *“Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu”*

Pasal 446. “Pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum”

8. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan di dalam KUH Perdata di atas adalah jelas bahwa untuk menyatakan seseorang tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum (termasuk memilih dalam Pemilu) tidak bisa dilakukan begitu saja, melainkan haruslah melalui proses pengadilan yang komprehensif dan penetapan hakim. Proses peradilan sendiri bisa memakan waktu berbulan-bulan. Apakah proses hukum ini memungkinkan untuk dilakukan terhadap setiap orang di Indonesia, mulai dari perkotaan sampai pelosok desa, yang dianggap sedang dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap (terganggu ingatannya) sebelum proses pendaftaran pemilih berlangsung?
9. Bahwa Selain masalah teknis dan finansial terkait penilaian kecakapan seseorang untuk memilih juga mendatangkan banyak masalah prinsipal. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pada keinginan untuk melindungi integritas sistem politik dari orang-orang yang dianggap tidak mampu untuk memformulasikan pandangan politik yang benar/valid. Berdasarkan argumen tersebut, mereka yang dianggap tidak memiliki kapasitas untuk memilih per definisi juga dianggap tidak mampu untuk memilih secara kompeten. Namun legitimasi dari argumen ini juga patut dipertanyakan, karena bukan negara yang menentukan manakah pilihan politik yang “benar” itu. Walaupun mungkin ada penyandang disabilitas yang tidak mampu untuk membuat pilihan politik yang rasional, namun banyak sekali kalangan diluar penyandang disabilitas yang juga tidak membuat pilihan politik yang “rasional” dan “kompeten”. Contohnya banyak orang yang memilih salah satu calon karena dibayar (politik uang). Jelas ini bukanlah sebuah pilihan berdasarkan pertimbangan yang rasional, valid dan kompeten. Oleh karena itu, apabila baik penyandang disabilitas maupun yang bukan penyandang disabilitas bisa melakukan pilihan politik yang tidak rasional dan kompeten, tidak adil bahwa hanya penyandang disabilitaslah yang dibatasi hak pilihnya serta diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan kompetensi. Hanya Prasangka dan diskriminasi terhadap disabilitaslah yang bisa membenarkan praktek ini;
10. Bahwa penilaian kapasitas memilih bukanlah cara yang proporsional untuk menguji kompetensi seseorang untuk memilih. Penilaian kapasitas berdasarkan pada asumsi bahwa adalah mungkin untuk secara objektif memisahkan pemilih yang "tidak mampu" dari yang lain. Namun secara ilmiah tidak ada cut-off point antara orang yang mampu memilih dengan yang kurang/tidak mampu untuk memilih. Ditambah lagi dengan pandangan yang sudah berlangsung demikian lama bahwa penyandang disabilitas mental tidak mampu untuk mengelola urusan mereka, untuk membuat keputusan yang kompeten, dan untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Bahkan para profesional yang berpartisipasi dalam proses penilaian, seperti psikolog,

psikiater, pekerja sosial dan lain-lain, juga tidak kebal terhadap prasangka ini. Dengan demikian, asesmen terhadap kemampuan untuk memilih akan selalu beresiko tercabutnya hak memilih dari para penyandang cacat yang sebetulnya mampu memilih;

11. *Bahwa Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Disabilitas melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Pasal 29 dari konvensi ini menuntut Negara untuk memastikan bahwa para penyandang disabilitas secara efektif dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan orang lain, termasuk dengan menjamin hak pilihnya. Pasal 29 tidak melihat adanya pembatasan yang bisa dibenarkan, juga tidak mengizinkan adanya pengecualian untuk kelompok penyandang disabilitas tertentu. Oleh karena itu, pengecualian hak untuk memilih atas dasar disabilitas mental (gangguan jiwa), baik yang sekedar dugaan maupun yang aktual, termasuk pembatasan berdasarkan penilaian individual, merupakan diskriminasi atas dasar kecacatan;¹¹⁰*

Menurut pandangan peneliti argumentasi pemohon menggunakan beberapa pasal dalam penjelas permasalahan seperti pasal 433 KUH Perdata bahwasanya orang dalam gangguan jiwa/ mental termasuk dibawah pengampuan baik gangguan jiwa permanen maupun gangguan jiwa permanen, pasal 442 disebutkan proses pengangkatan sebagai pengampu berada di Pengadilan Negeri berdasarkan kesimpulan jaksa. Pasal 446 apabila diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri maka sah pengangkatan sebagai pengampu dan terhitung waktu semenjak putusan tersebut dikeluarkan. Beberapa pasal tersebut menjelaskan orang dalam gangguan jiwa tidak bisa dihilangkan haknya (hak untuk menentukan pilihan politik) secara keseluruhan, ada beberapa prosedur menentukan seseorang yang dianggap tidak cakap. Pasal 57 ayat (3) huruf a syarat sebagai pemilih dalam Pemilu “*tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya*” pasal ini menyebutkan bahwa

¹¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, Tentang Hak Memilih Orang dalam Gangguan Jiwa.

orang dalam gangguan jiwa tidak dapat memilih Pemilu tanpa melalui proses di Pengadilan Negeri, hal ini bertentangan dengan KUH Perdata Pasal 436, 437, 438, 440 dan 442.

1. Pandangan Al-Qur'an dan Hadis Tentang Memilih Pemimpin

Dalam kehidupan bermasyarakat, potensi terjadinya benturan antar anggota masyarakat sangatlah memungkinkan, bahkan dalam skop sekecil apapun. Benturan itu bisa terjadi akibat perbedaan kepentingan, pikiran, dan perasaan. Untuk menghindari terjadinya benturan, diperlukan tampilnya seorang pemimpin yang dipercaya dapat mengatasi persoalan. Karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah ketentuan sebagai berikut:

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Apabila ada tiga orang melakukan perjalanan maka hendaklah salah satu dari mereka diangkat menjadi pemimpin (HR. Abu Dawud).¹¹¹

Melalui sebuah masyarakat yang memiliki pemimpin dan menempati suatu wilayah tertentu, serta memiliki aturan main yang harus ditaati oleh kedua belah pihak, yaitu orang yang memimpin dan orang yang dipimpin, terbentuklah institusi yang disebut dengan Negara. Kehadiran Negara lalu menjadi niscaya, baik dalam pandangan akal, realitas sosial, maupun karakter manusia meniscayakan hadirnya Negara.¹¹²

¹¹¹ Afifuddin Muhajir, *“Fiqh Tata Negara”*,H.68.

¹¹² Ibid.

Bagi Islam, keniscayaan hadirnya Negara merupakan sebuah konsekuensi logis dari adanya aturan-aturan syariat yang tidak mungkin terlaksana tanpa kehadiran Negara. Dengan demikian, kehadiran Negara menjadi syarat dan instrument bagi terlaksananya aturan-aturan syariat. Dalam hal ini, kaidah fiqh mengatakan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang menjadi syarat terwujudnya perkara wajib adalah wajib”¹¹³

Peneliti berpandangan bahwasanya memilih pemimpin dalam suatu Negara hukumnya wajib berdasarkan hadis dan kaidah fikih diatas, karena pada dasarnya mengelola sebuah Negara perlu suatu sistem yang mengatur didalamnya, tentunya semua orang menghendaki pemimpin yang amanah dalam memimpin Negara, bijaksana dalam menyelesaikan masalah dan adil dalam bertindak dalam suatu perkara. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa wajib memilih pemimpin muslim dan mampu memegang amanah dan tanggung jawab. Adapun ayat membahas tentang wajibnya memilih pemimpin muslim terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 57 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾¹¹⁴

¹¹³ Ibid., H.69.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.” (QS. Maidah Ayat 57)¹¹⁵

Dalam ayat ini menegaskan bahwasanya wajib memilih pemimpin muslim, ketika dihadapkan dengan situasi ada pemilihan pemimpin non muslim dan muslim maka wajib memilih yang muslim, sebaliknya ketika semua calon pemimpin beragama muslim yang terbaik diantaranya. Apa yang harus dilakukan ketika calon pemimpin yang dipilih itu semua Muslim atau semuanya non-Muslim, atau mungkin juga dihadapkan pada pilihan yang dilematis, misalnya dua calon pemimpin yang harus dipilih salah satunya Muslim tetapi tidak berkualitas (jelek) dan satunya lagi berkualitas (baik) tetapi non-Muslim. Permasalahan seperti ini tentu menuntut kecermatan dan kehati-hatian. Jika calon pemimpin itu semuanya Muslim, tentu yang harus dipilih adalah yang terbaik. Untuk menentukan siapa yang terbaik di antara mereka, sangatlah relatif. Setiap mengatakan si A yang terbaik atau si B yang terbaik, dengan kriteria tertentu yang dipakai. Jika berpartai A, maka hampir bisa dipastikan akan memilih pemimpin yang berpartai sama, yakni partai A, begitu juga yang lain. Namun, jika pemimpin itu tidak dalam satu partai, maka pilihlah pemimpin yang

¹¹⁴ Al-Maidah [57].

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *“Al-Qur'an & Terjemahannya”*, Jakarta: Depag RI, 2008, H. 117.

di anggap terbaik. Objektivitas baik yang terakhir ini tentu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan satunya, yakni pemimpin yang berpartai sama.”¹¹⁶

Bahwasanya orang gangguan jiwa tidak sah melakukan suatu ibadah atau perbuatan hukum lainnya sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

Artinya: “Tiga orang yang tidak dianggap bertanggung jawab atas pertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu orang gila hingga ia kembali waras, orang yang tidur hingga ia tersadar (bangun) dari tidurnya, dan anak-anak hingga ia bermimpi (baligh). (H.R Bukhari, Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Nasai, dan Ibnu Majah)

Dalam hadits diatas bahwasanya ada 3 orang yang tidak dibebankan suatu kewajiban yaitu salah satunya orang dalam gangguan hingga dia sembuh, hal ini juga berlaku pada hak dan kewajiban hukum lainnya, orang dalam gangguan jiwa tidak di kenai kewajiban sampai dia sembuh, hal ini dikarenakan orang dalam gangguan jiwa terbatas akalnya dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam mengkaji hak memilih pemimpin termasuk suatu perbuatan hukum, orang dalam gangguan jiwa dalam memilih pemimpin perbuatannya dianggap menggugurkan haknya kecuali orang dalam gangguan jiwa tersebut telah sadar atau sudah sembuh dalam gangguan jiwanya.

¹¹⁶ Marzuki, “Jurnal Memilih Pemimpin Yang Benar Dalam Perspektif Islam”, T.h, H. 3.

Pada tanggal 25 Januari 2009 MUI menfatwakan bahwasanya golput (golongan putih) atau tidak mengikuti pemilihan dalam pemilu yaitu haram. Berdasarkan hasil sidang yang dihadiri sekitar 750 orang ulama tersebut, disepakati lima point penting, yaitu: (1) Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. (2) Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imâmah* dan *imârah* dalam kehidupan bersama. (3) *Imâmah* dan *imârah* dalam Islam menghajatkan syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat. (4) Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddîq*), terpercaya (*amânah*), aktif dan aspiratif (*tablîgh*), mempunyai kemampuan (*fathânah*) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah *wajib*. (5) Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah *haram*.¹¹⁷

Penulis berpandangan bahwasanya mengikuti pemilu dalam memilih seseorang pemimpin wajib hukumnya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis serta fatwa dari MUI. Ketika mempunyai hak pilih dan tidak digunakan maka perbuatan tersebut biasa disebutkan dalam menolak *amâr ma'rûf nahi mungkar*, ketika ada suatu pemimpin ada yang lebih baik dan beragama muslim dan tidak

¹¹⁷ Sodikin, "Jurnal Pemilihan Umum Menurut Islam", Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta, Vol. XV, T.h, H. 65.

ada unsur *syara* menghalangi dalam memilih pemimpin maka disebut tidak mentaati Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Berkaitan dengan pembahasan penulis tentang hak memilih orang dalam gangguan jiwa, maka hal ini perlu melihat lagi bagaimana orang dalam gangguan jiwa diperbolehkan untuk memilih, hal ini penulis berpandangan bahwasanya perlu klasifikasi orang dalam gangguan jiwa yang bagaimana diperbolehkan untuk memilih seseorang dalam pemimpin. Orang dalam gangguan jiwa disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 yaitu gangguan jiwa ringan atau *episodic* (kambuhan), orang gangguan jiwa yang boleh memilih juga harus mendapatkan surat keterangan dokter boleh memilih dan masih dalam proses masa penyembuhan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan orang gangguan jiwa yang masih masa penyembuhan dilingkungan masyarakat merasa di kucilkan dan di diskriminasi, selain itu juga haknya terabaikan sebagai warga negara dan ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Penulis juga berpandangan bahwasanya hal ini dapat menimbulkan keMashlahatan apabila orang dalam gangguan jiwa ringan yang bersifat *episodik* (kambuhan) dan dinyatakan oleh dokter ahli kejiwaan bisa mengikuti Pemilihan Presiden dengan terpenuhi syarat-syaratnya, selain itu juga dapat mempercepat masa penyembuhan dan menghilangkan diskriminasi hak dikalangan masyarakat luas.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 135/PUU-XII/2015 dalam Analisis Kaidah Fikih *Siyāsah*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”*¹¹⁸

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.¹¹⁹

Kaidah ini sesuai dengan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 135/PUU-XIII/2015, kebijakan dari sebuah negara harus mengandung unsur keMashlahatan didalamnya baik itu keputusan presiden ataupun Lembaga peradilan yang dapat menimbulkan suatu konsekuensi hukum dimasyarakat. Penulis berpendapat bahwasanya mengandung keMashlahatan apabila diterapkan sesuai dengan putusan tersebut, keMashlahatan yang ditimbulkan yaitu seseorang dalam gangguan jiwa yang dalam masa penyembuhan mentalnya berangsur-angsur membaik karena haknya dihargai tanpa adanya diskriminasi. Apabila putusan tersebut mengandung suatu kemudharatan di masyarakat maka putusan ini wajib ditinjau kembali sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

¹¹⁸ A. Djazuli, *“Kaidah-kaidah Fikih”*, H. 147.

¹¹⁹ Imam Musbikin, *“Qawa'id Al-Fiqhiyah”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, H.124

هُمَّ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”¹²⁰

Kaidah di atas menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga Negara yang dilandasi oleh moral *ukhuwah wathaniyah* (cinta tanah air), meskipun mereka berbeda warna kulit, bahasa, dan budaya serta kekayaannya. Ulama menggunakan kaidah di atas dalam konteks hubungan antar warga Negara muslim dan dzimmi (kafir dzimmi). Mereka berkedudukan sama di hadapan penguasa dan hukum.

Penulis menambahkan tidak hanya persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga Negara yang berbeda warna kulit, bahasa, dan budaya serta kekayaannya, akan tetapi juga permasamaan kepada orang dalam gangguan jiwa ringan (*episodik*), disabilitas fisik, orang yang sedang sakit. Hak-hak mereka sebagai warga negara tidak dikurangi sesuai dengan undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM), dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Mereka tetap boleh memilih dengan ketentuan persyaratan dari KPU harus terpenuhi.

مَا لَا يَدْرُكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”¹²¹

¹²⁰ A. Djazuli, “Kaidah-kaidah Fikih”, H. 153.

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil, tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus meninggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada.¹²²

Penulis sependapat dengan kaidah ini, karena apabila di lihat lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak memilih orang dalam gangguan jiwa dalam pemilu, yang nantinya kemudian hari menimbulkan permasalahan baru dan kegelisahan di masyarakat maka harus ditinggalkan akan tetapi apabila ada keMashlahatan didalamnya tidak semua ditinggalkan, orang dalam gangguan jiwa ringan perlu adanya kontrol dan pengawasan dari masyarakat, tidak diperbolehkan adanya diskriminasi seperti pengucilan, ejekan dan lain-lain yang mengakibatkan emosional dan mental menjadi terganggu.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015

Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim pasti memiliki pertimbangan yang akan di jadikan sebuah dasar hukum di antaranya yaitu:

¹²¹ Ibid.

¹²² Ibid.

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;¹²³
2. Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

¹²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, Tentang Hak Memilih Orang dalam Gangguan Jiwa.

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), yang menyatakan: “(3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:¹²⁴

- a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹²⁵

3. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.¹²⁶

Negara sangatlah menjunjung tinggi hak seseorang, hal ini tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”, Ketentuan Pasal 28D ayat (1) tersebut mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Ibid.

pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Pilpres dan Pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Adapun Undang-undang tentang HAM ada yang menyatakan bahwa hak politik seseorang pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil hal ini tercantum dalam pasal 28J ayat (2):

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”¹²⁷

Pasal 28J ayat (2) di atas menjelaskan bahwasanya untuk menjalankan hak dan kebebasan dimungkinkan adanya suatu pembatasan, Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal tersebut harus diatur dalam UU, artinya tanpa adanya pengaturan tentang pembatasan tersebut maka tidak dimungkinkan dilakukannya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia. Ada beberapa kebebasan HAM yang Dibatasi oleh Undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku, seperti dalam Peraturan Komisi

¹²⁷ Undang-undang Pasal 28J ayat (2).

Pemilihan Umum (PKPU) tahun 2018 dalam pasal 4 ayat (2) huruf f *“tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia”* pasal tersebut menyatakan bahwasanya syarat pemilih tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwasanya Hak politik seseorang tidaklah mutlak harus ada pada seseorang warga negara, ini karena adanya pembatasan-pembatasan hak yang dimiliki seseorang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, yang sesuai tercantum pada pasal 28J ayat (2).

Dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”¹²⁸

Undang-undang tersebut melihat orang dalam gangguan jiwa termasuk dalam penyandang disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikiran, tingkah laku, dan emosional. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 13 mempunyai hak politik

¹²⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1.

yang sama dengan warga lainnya, adapun hak politik orang dalam gangguan jiwa menurut Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 13 sebagai berikut:

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
3. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
6. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
7. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
8. memperoleh pendidikan politik.¹²⁹

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 menegaskan bahwa penderita gangguan jiwa memiliki persamaan hak dengan warga negara yang tidak memiliki disabilitas mental. Hal ini jelas bahwasanya orang dalam gangguan jiwa boleh memilih dalam Pemilihan Umum (PEMILU), hal ini ada pemenuhan hak dan tujuan yang dicapai

¹²⁹ Ibid.

dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 2 dan pasal 3 penyandang disabilitas mental atau orang dalam gangguan jiwa yaitu:

1. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:
 - a. Penghormatan terhadap martabat;
 - b. otonomi individu;
 - c. tanpa Diskriminasi;
 - d. partisipasi penuh;
 - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
 - f. Kesamaan Kesempatan;
 - g. kesetaraan;
 - h. Aksesibilitas;
 - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
 - j. inklusif; dan
 - k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.¹³⁰
2. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:
 - a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

¹³⁰ Ibid.

- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.¹³¹

Jika dilihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 135/PUU-XIII/2015, sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 13 karena penyandang disabilitas mental atau orang dalam gangguan jiwa mempunyai hak yang sama dalam politik, mereka juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-undang 1945 pasal 28J ayat 2 menyatakan bahwasanya Hak seseorang baik dalam politik, sosial dan ekonomi ada pembatasan yang diatur dalam Undang-undang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Undang-

¹³¹ Ibid.

undang nomor 8 tahun 2016 pasal 13 huruf F dibatasi oleh putusan MK Nomor. 135/PUU-XIII/2015. Bahwasanya untuk orang dalam gangguan jiwa tidak semua yang boleh memilih, ada orang gangguan jiwa tertentu saja boleh memilih seperti orang gangguan jiwa ringan, atau orang gangguan *episodik* (kambuhan), harus menadapatkan surat keterangan dari dokter. Putusan MK tersebut mengklasifikasikan orang gangguan jiwa atau penyandang disabilitas mental seperti apa yang boleh memilih dalam pemilu berlangsung.

Dalam teori keadilan hal ini sesuai dengan putusan MK tersebut, karena sesuai dengan teori keadilan yaitu Mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau warga Negara satu dengan warga Negara yang lainnya. Menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga satu dengan yang lainnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam maksud teori tersebut tidak ada salah satu masyarakat keadilaannya dirusak seperti halnya dengan tidak memberi hak pilih kepada orang gangguan jiwa sementara hal tersebut mengakibatkan orang gangguan jiwa dikucilkan di lingkungannya sehingga hal tersebut mengakibatkan terganggunya proses penyembuhannya tersebut. Maka oleh karena itu penulis menambahkan teori keadilan yang bersifat komutatif sebagai pisau bedah analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dalam kacamata hukum Islam berbeda pandangan menilai orang gangguan jiwa ringan atau penyandang disabilitas mental tentang kebolehan

dalam memilih pemimpin, hak politik seseorang dalam hukum Islam memandang perspektif seseorang berakal, cakap, dan *Mumayyiz/Tamyiz*. Akal merupakan aspek utama perbuatan seorang *mukallaf* dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Ketika seseorang sudah melewati masa *mumayyiz* semua perbuatannya dikenakan hukum yang berlaku baik perbuatan yang bersifat muamalah maupun ibadah. orang dalam gangguan jiwa bisa diartikan sebagai orang yang masih *mumayyiz*, karena segala sesuatu perkataan maupun perbuatannya dalam pengampuan walinya.

Majnūn diartikan sebagai orang gila. Gila itu berlawanan dengan syarat yang penting bagi ibadah, yakni kewajiban ada niat dalam ibadah. Orang gila tidak dapat melakukan niat atau niatnya tidak dipandang sah. Dan gila itu ada yang berkepanjangan dan yang sementara. Ada yang datang sebagai factor ekstern, ada bawaan yang memang telah bersemi dalam diri orang gila itu. Oleh karena itu, gila berkepanjangan tidak diberikan batasan umum. Dalam aspek ibadah, orang gila terlepas dari tuntutan (*taklif*) mengerjakan shalat, selama dalam masa gilanya, tidak membayar zakat, bila gilanya lewat satu tahun.¹³²

Dalam persoalan perdata, orang gila dapat dikenai sesuatu pembayaran ganti rugi, bila dia merusak harta orang dengan diambilkan dari hartanya. Hal ini sama dengan anak kecil yang merusak harta seseorang, karena mengingat variable

¹³² Achmad yasin, *ilmu usul fiqh*, Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014, H. 142.

tahaqquq al-fi'li dan *ishmat al-mahalli*, secara nyata telah terjadi kerusakan dan hal itu tidak boleh diabaikan.¹³³

Hakim dalam menentukan apakah orang dalam gangguan jiwa boleh memilih atau tidak, hakim dapat berijtihad dengan menggunakan metode istinbat hukum. Ada beberapa metode yang dapat digunakan metode penetapan hukum yaitu *Pertama*, metode verbal (*at-turūq al-lafzhīyah*), yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu kepada analisis kebahasaan. Umpamanya, lafaz-lafaz '*amm, khas, Mutlaq, muqayyad, amar, nahi*. *Kedua*, metode substansial (*at-turuq al-ma'nawiyah*), yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu substansi hukum Islam (*al-iltifāt ilā ala-ma'āni wa al-maqāsid*), yang terwujud dalam bentuk metode *qiyas, istihsān, mashlahah mursalah*, dan lain-lain.¹³⁴ Dalam metode pertama hakim bisa melihat teks Undang-undang terdahulu atau aturan yang berkaitan dengan persyaratan dalam memilih, kemudian hakim melihat dari segi kebahasaan teks yang bersifat khusus. Jika hakim menggunakan metode kedua yaitu melihat substansi dari akar permasalahannya, kemudian diaplikasikan menggunakan dalam metode *qiyas, istihsān, mashlahah mursalah*, dan lain-lain. Apabila orang dalam gangguan jiwa diperbolehkan untuk memilih dalam Pemilu apa dampak yang timbulkan, apakah menimbulkan *keMashlahatan* ataupun sebaliknya menimbulkan suatu *kemudharatan*, maka perlunya menggunakan

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Duski Ibrahim, "*Metode Penetapan Hukum Islam*", Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2008, H. 22.

metode *mashlahah mursalah* melihat suatu *keMashlahatan* dalam suatu permasalahan. Hakim perlu melihat persyaratan subjek hukum atau perbuatan *mukallaf*, dalam pembahasan terkait dengan *Mahkum 'Alaih*, bahwasanya kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban ibadah seperti melaksanakan sholat fardhu, puasa, Haji dan kewajiban ibadah lainnya. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia, semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan napas terakhir dalam segala sifat, kondisi, dan keadaannya. Kecakapan untuk dikenai hukum disebut dengan *ahliyah al-wujub* dalam persoalan orang dalam gangguan jiwa bisa disebut dengan *ahliyah al-wujub nāqish* atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seseorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban; atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.

Orang dalam gangguan jiwa tetap mendapatkan haknya seperti menerima waris atau wasiat. Orang dalam gangguan jiwa terbagi menjadi dua yaitu orang gangguan jiwa permanen dan orang gangguan jiwa bersifat sementara *episodik* (kambuhan). Gila yang berketerusan menggugurkan seseorang dari beban hukum sejauh yang menyangkut kewajiban fisik seperti shalat, puasa, kaffarah, dan lainnya. Dalam memilih pemimpin termasuk suatu beban hukum karena untuk menentukan pilihannya kepada calon pemimpin perlu mengenal siapa itu pemimpinnya, artinya seseorang untuk memilih pemimpin diperlukan adanya akal

untuk memilih pemimpinnya, untuk memilih pemimpin muslim yang adil dan amanah hukumnya adalah wajib dan fatwa MUI mengharamkan untuk golput. Maka dari itu orang gangguan jiwa permanen tidak dapat mengikuti Pemilu untuk menentukan calon pemimpinnya karena syarat menerima beban hukum tidak terpenuhi orang yang sedang gangguan jiwa permanen. Adapun orang dalam gangguan jiwa yang tidak memanjang (*ghair muabbad*), yaitu gila yang datang sewaktu-sewaktu dan dalam waktu yang tidak lama. Mengenai hukum yang berlaku terhadap gila yang bersifat sementara ini atau *episodik* (kambuhan) berbeda hukum yang berlaku pada orang gangguan jiwa yang memanjang. Untuk gangguan jiwa sementara (kambuhan) dalam bentuk ini tidak meniadakan pokok-pokok kewajiban; sebab tanggung jawab dan kewajiban tetap melekat padanya. Karenanya ia tetap mempunyai hak milik dan berhak mewarisi. Selama ditemukannya kewajiban, maka berlaku pula baginya tuntutan hukum.

Sama halnya dengan hak memilih pemimpin orang dalam gangguan jiwa sementara atau *episodik* (kambuhan) diperbolehkan menurut teori diatas selama dalam masa pencoblosan ia tidak mengalami gangguan jiwa atau kambuh. Apabila pada saat pemilihan pemimpin berlangsung ternyata kambuh maka ia tidak dibebani hukum untuk memilih pemimpin.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 ditinjau perspektif *Fiqh Siyyasah*

Pengertian *fiqh Dusturiyah*, kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (Pemuka Agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan syari'ah digunakan istilah *fiqh dusturī*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara manapun, seperti terbukti di dalam Perundang-Undangan, Peraturan- Peraturannya dan Adat- istiadatnya.¹³⁵ Dari dua takrif ini dapat menjelaskan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata *dasar* dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *dustur*. Dengan demikian *siyāsah dustūriyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah Perundang-Undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, Undang-Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum- hukum syari'at yang disebutkan dalam Al-

¹³⁵ Imam Amrusi Jailani, dkk., "*Hukum Tata Negara Islam*", Surabaya: IAIN Press, 2011, H. 22.

Qur'an dan yang dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai Akidah, Ibadah, Akhlak, Muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain.¹³⁶

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan Agama. Sehingga tujuan dibuatnya Peraturan Perundang-Undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyāsah* akan tercapai.¹³⁷

Permasalahan didalam *fiqh siyāsah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-Undangan yang di tuntut oleh hal Ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Fiqh siyāsah dustūriyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Ibid., H. 23.

2. Persoalan *imāmah*, hak dan kewajibannya;
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
4. Persoalan bai'at;
5. Persoalan *waliyul ahdi*;
6. Persoalan perwakilan;
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
8. Persoalan *wuzāroh* dan perbandingannya.¹³⁸

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyāsah dustūriyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, *maqāsid al-syari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kullīy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam merubah masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyāsah dustūriyah* ini dapat di bagi kepada:

1. Bidang *siyāsah tasrī'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

¹³⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, H. 73.

2. Bidang *siyāsah tanfīdiyyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang *siyāsah qadlā'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyāsah idāriyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.¹³⁹

Dalam Mahkamah Konstitusi menurut fiqh *siyāsah* termasuk kategori *siyāsah dustūriyah*, yaitu mencakup tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Dalam suatu kelembagaan *siyāsah dustūriyah* persoalan kelembagaan negara seperti Mahkamah Konstitusi termasuk dalam *siyāsah tasrī'iyah* pembahasan Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwasanya sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”; artinya orang dalam gangguan jiwa ringan diperbolehkan untuk memilih dalam pemilu dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter. Menurut sebuah penelitian Jaringan Survei Inisiatif ada empat instrumen penilaian untuk menilai orang dalam gangguan jiwa dapat menggunakan hak pilihnya

¹³⁹ *Ibid.*, H. 74.

dibilik suara. Empat komponen untuk menilai apakah seseorang memiliki kapasitas memilih dalam pemilu yaitu:

1. *understanding*: apakah dia mengerti akan adanya pilihan yang diberikan;
2. *expression of choice*: apakah dia mampu menyatakan pilihannya;
3. *reasoning*: apakah dia memiliki alasan untuk memilih; dan
4. *appreciation* apakah dia mengetahui konsekuensi pilihannya.

Empat komponen tersebut sesuai dengan teori *mashlahah murshalah* karena aspek tersebut memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat awam bahwa orang dalam gangguan jiwa yang bersifat sementara atau *episodik* (kambuhan) tidak serta semuanya yang boleh memilih, ada aspek kajian ilmu kejiwaan yang membatasi sehingga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 135/PUU-XIII/2015 bersifat khusus atau *lex specialis* (hukum berketentuan khusus). Selain itu juga aspek tersebut menimbulkan suatu keMashlahatan untuk menghindari adanya kecurangan dalam pemilu berlangsung. Setelah putusan tersebut menimbulkan *Mashlahat*, maka putusan tersebut menjadi kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat yang sesuai dengan teori keberlakuan hukum sesuai dengan landasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Putusan MK tersebut dalam kajian *Maqāṣid al-Shari'ah* termasuk menjaga jiwa (*Hifz Al Nafs*) Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia, menjaga hak-hak politik bagi orang gangguan jiwa termasuk dalam *Hifz Al Nafs* dengan tingkatan *hajiyyat* atau sekunder, karena orang dalam gangguan jiwa sementara tidak ada nash Al-Qur'an dan Hadist yang melarangnya dan tidak ada juga yang memperbolehkan dalam memilih pemimpin, selain itu juga untuk

menghilangkan diskriminasi di tengah masyarakat awam, membantu proses penyembuhan dari gangguan jiwa. Memberikan hak pilih kepada orang dalam gangguan jiwa yang bersifat sementara termasuk dalam menjaga akal dengan tingkatan *Hajiyah*, karena tidak mengakibatkan hilang pada dirinya (orang dalam gangguan jiwa) tetapi menghilangkan suara sebagai hak pilih.

Letak hubungan antara *Maqāshid Syariah* dan *al-maṣlaḥah* adalah berada pada kesamaan teori yaitu keduanya membahas tentang *Al-Maṣlaḥah al-ḍarūrīyah*, *Al-Maṣlaḥah al-ḥājīyah* dan *Al-Maṣlaḥah al-taḥsīnīyah*. Ketiga hal ini berujung pada satu tujuan yang disebut kemaslahatan dan pada kenyataannya keduanya juga sama-sama membahas tentang kemaslahatan. Kemaslahatan itu pun kembali kepada tiga hal yang disebutkan sebelumnya yaitu kemaslahatan primer (*ḍarūrīyah*), sekunder (*ḥājīyah*) dan tersier (*taḥsīnīyah*).¹⁴⁰

Terbaginya tiga macam kemaslahatan tersebut secara otomatis menunjukkan adanya kemaslahatan yang bertingkat. Untuk memperoleh tingkatan ini mesti dilakukan dengan pengkajian dan tentunya juga terkait dengan kategori-kategori tertentu atau bahkan termasuk syarat-syarat tertentu agar dapat disebut mengandung kemaslahatan. Khusus terkait dengan syarat ini baik *Maqāshid Syariah* ataupun *al-maṣlaḥah* sama-sama menentukan syarat terhadap sesuatu agar dapat disebut sebagai

¹⁴⁰ Abdul Helim, "*Maqāshid al-Sharī'ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*" H. 48.

kemaslahatan. Maksudnya adalah bahwa syarat-syarat yang ditentukan *al-maṣlahah* adalah syarat-syarat yang ditentukan pula oleh *Maqāshid Syariah*.¹⁴¹

Menurut hemat penulis putusan Mahkamah Konstitusi nomor. 135/PUU-XII/2015. Dalam tinjauan *Al-Maslahah Mursalah* putusan tersebut termasuk dalam kebutuhan sekunder atau *Al- Maslahah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan, orang dalam gangguan jiwa tidak boleh memilih tidak menghilangkan sesuatu yang dharurat pada dirinya akan tetapi apabila hak memilihnya dihilangkan maka pandangan masyarakat terhadap orang dalam gangguan jiwa menjadi buruk, sehingga orang gangguan jiwa sementara menjadi tidak percaya diri atau minder dan menjadi faktor penghambat proses penyembuhannya itu sendiri.

Menurut Peneliti Teori *Maqāshid Syariah* Jasser Auda sangat erat berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135. /PUU-XIII/2015. Apabila ditinjau dalam *Maqāshid Syariah* yaitu *hifzul-irdi* (menjaga kehormatan) lebih modernnya yaitu menjaga harkat dan martabat manusia. Pandangan *Maqāshid Syariah* Jasser Auda membuka lebih luas mengenai *Ushulul Khamsah* atau lima asasi, pada saat ini menjaga harkat dan martabat manusia dapat dikaitkan dengan menjaga hak-hak asasi manusia seperti hak-hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, perlakuan

¹⁴¹ *Ibid.*, H. 49.

adil, perlindungan dari penyiksaan, suaka, kebebasan berkeyakinan dan menyatakan pendapat, kebebasan bersekutu, Pendidikan dan kebebasan beraktivitas.

Dalam analisis peneliti Putusan tersebut dikategorikan didalam *Maqāshid al-Sharī'ah* yaitu *Maqāshid al-ummah* yaitu mempunyai sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan seperti keadilan dan kemudahan. Seperti halnya dengan orang dalam gangguan jiwa ringan juga menginginkan haknya sebagai warga negara untuk bisa memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya, sehingga hal tersebut mewujudkan hukum yang berkeadilan sesuai dengan metode kajian *Maqāshid al-Sharī'ah*. Selain itu juga mempermudah hak orang dalam gangguan jiwa ringan juga termasuk dalam kajian ini karena membatasi suatu hak termasuk mengekang seseorang dan ini tidak dibenarkan oleh agama dan negara.

Hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk memilih pemimpin merupakan sesuatu yang wajib didapatkan oleh seorang warga negara, tidak membedakan baik suku, ras, agama atau keyakinan dan lainnya. Seperti halnya dengan orang dalam gangguan jiwa yang bersifat sementara juga memiliki hak yang sama untuk dapat memilih pemimpin, walaupun prasyaratnya berbeda dengan masyarakat kebanyakan pada umumnya.

Pendekatan berbasis *Maqāshid* terhadap isu hak-hak asasi manusia mendukung terhadap orang gangguan jiwa sementara atau *episodik* (kambuhan) juga tidak semua yang boleh memilih, perlu adanya pemeriksaan dari dokter ahli jiwa, karena yang menentukan kondisi yang dapat menentukan bisa atau tidaknya orang gangguan jiwa sementara boleh memilih pada saat hari pencoblosan hanya dokter ahli

jiwa, dengan pendekatan *kemshlāhatan* yaitu *al-hājīyyah* (sekunder) artinya orang gangguan jiwa ringan tidak mengancam hidupnya apabila tidak mengikuti Pemilu, akan tetapi hanya mempengaruhi lingkungannya dimasyarakat sehingga hal itu menyebabkan memperlambat proses masa penyembuhannya karena dikucilkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 135/PUU-XIII/2015 ada beberapa yang melatarbelakangi putusan tersebut yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, disahkannya melalui usulan dari DPR. Hasil revisi tersebut di atas menghasilkan ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a bahwa salah satu persyaratan warga negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang sedang “*tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya*”. Ketentuan ini sangat potensial akan menghilangkan hak seorang warga negara untuk terdaftar sebagai pemilih dan memberikan hak suaranya di dalam penyelenggaraan Pilkada. Memilih pemimpin muslim yang amanah, bertanggungjawab, serta dapat berlaku adil merupakan kewajiban Bersama sesuai dengan perintah yang ada didalam Al-Qur'an dan Hadis. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 57. Ayat tersebut menjelaskan kepada bahwasanya sangatlah penting memilih pemimpin dan janganlah memilih pemimpin yang membuat agama Islam hanyalah sebuah ejekan semata atau sendagurau. Fatwa MUI mengharamkan Golput (golongan putih) hal ini dikarena memilih pemimpin yang berkarakter muslim sebagai salah satu mewujudkan cita-cita bangsa yang menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada 3 (tiga) orang yang tidak dibebani hukum yaitu, orang gila sampai dia kembali waras, orang

tidur sampai di bangun dan anak-anak sampai dia dewasa. Apabila dikaitkan dengan Pemilu (Pemilihan Umum) orang dalam gangguan jiwa tidak mempunyai hak pilih apabila gangguan jiwanya tersebut bersifat permanen. Gangguan jiwa bersifat sementara boleh memilih dengan catatan pada saat pencoblosan dia tidak kambuh.

2. Hakim dalam menentukan apakah orang dalam gangguan jiwa boleh memilih atau tidak, hakim dapat berijtihad dengan menggunakan metode istinhbat hukum. Ada beberapa metode yang dapat digunakan metode penetapan hukum yaitu *Pertama*, metode verbal (*at-turuq al-lafzhiyah*), yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu kepada analisis kebahasaan. Umpamanya, lafaz-lafaz '*amm*, *khas*, *Mutlaq*, *muqayyad*, *amar*, *nahi*. *Kedua*, metode subtansial (*at-turuq al-ma'nawiyah*), yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu subtansi hukum Islam (*al-iltifāt ilā ala-ma'āni wa al-maqāsid*), yang terwujud dalam bentuk metode *qiyas*, *istihsān*, *mashlahah mursalah*, dan lain-lain.
3. Dalam Mahkamah Konstitusi menurut fiqh *siyāsah* termasuk kategori *siyāsah dustūriyah*, yaitu mencakup tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Dalam suatu kelembagaan *siyāsah dustūriyah* persoalan kelembagaan negara seperti Mahkamah Konstitusi termasuk dalam *siyāsah tasrī'iyah* pembahasan Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang diajukan:

1. Bagi pemerintah khususnya pembentuk Undang-Undang untuk menerapkan keputusan mahkamah konstitusi sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan agar tidak terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia.
2. Bagi para penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelaksanaan pemilu, dalam artian tidak sampai membuat kegaduhan atau sampai merusak fasilitas yang ada, supaya dapat mengembalikan kepercayaan pemerintah untuk di ikut sertakan di pemilu selanjutnya.
3. Orang dalam gangguan jiwa dalam frasa “*terganggu jiwa atau / ingatannya*” dimaknai sebagai orang gangguan jiwa bersifat menyeluruh, padahal tidak semua orang gangguan jiwa bersifat permanen semua oleh karena itu penulis menyarankan kata-kata tersebut diganti dengan “*Orang dalam masa penyembuhan jiwa*” yang dimaknai sebagai orang gangguan jiwa yang bersifat sementara atau *episodik* (kambuhan), sehingga pemaknaan tersebut sebagai pembeda antara orang dalam gangguan jiwa yang bersifat permanen dan orang gangguan jiwa bersifat sementara atau kambuhan. Selain itu juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 135/PUU-XIII/2015. menimbulkan suatu *kemashlahātan* dibidang *Mashlāhat mursalah* yaitu merupakan *masalah* yang

sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia agar terhindar dari kemudharatan, dengan tingkatan *hajīyah* yaitu sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan seperti halnya dengan orang dalam gangguan jiwa bersifat sementara mempunyai hak memilih dalam Pemilu untuk mempermudah masa penyembuhannya dan memberikan hak yang sama dengan warga negara lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Muhajir Afifuddin, *“FIQH TATA NEGARA (Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam)”*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

Musbikin, Imam, *“Qawa'id Al-Fiqhiyah”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Auda, Jasser, *“Membumikan Hukum Islam melalui Maqāshid Syariah”*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Undang-undang Pasal 28J ayat (2).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1.

Yasin, Achmad, *ilmu usul fiqh*, Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014.

Ibrahim, Duski, *“Metode Penetapan Hukum Islam”*, Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2008.

Amrusi Jailani, Imam, dkk., *“Hukum Tata Negara Islam”*, Surabaya: IAIN Press, 2011.

Suteki Dkk, *“METODE PENELITIAN HUKUM (Filsafat, Teori Dan Praktek)”*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Ochtorina Susanti, Dyah Dkk, *“Penelitian Hukum (Legal Research)”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Efendi, Jonaedi Dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Pasek Diantha, I Made, *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum”*, Jakarta: KENCANA, 2016.

Suratman Dkk, *“Metode Penelitian Hukum”*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Abdul kadir Muhammad, *“Hukum Perdata Indonesia”*, Bandung: PT. Cita Aditya Bakti, 2010.

Tim Redaksi Kamus Pusat Bahasa, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Usman, Rachmadi, *“Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia”*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Budiono, Herlien, *“Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

J. Satrio, *“Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Sembiring, Rosnidar, *“Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.

Kansil, C.T.S. *et al*, *“Modul Hukum Perdata”*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995.

Wade, Carole dkk, *“PSIKOLOGI”*, Jakarta: PENERBIT ERLANGGA, 2014.

Durand, V. Mark Dkk, *“Intisari Psikologi Abnormal”*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2007.

Sobur, Alex, *“Psikologi Umum”*, Bandung: CV SETIA PUSTAKA, 2003.

A. King, Laura, *“Psikologi Umum”*, Jakarta: Salemba Humanika, 2007.

- Palmquist, Stephen, *“Fondasi Psikologi Perkembangan”*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Wahab Khalaf, Abdul, *“Ilmu Ushul Fiqih”*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- A. Djazuli, *“Fiqh Siyâsah Edisi Revisi”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Zuhaily, Wahbah. *“Ushul Fiqh. kuliyyat da’wah al Islami”*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.
- S. Paradja, Juhaya, *“Fiqh Siyasah”*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, Januari 2015.
- Siahan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Pedoman Penulisan Skripsi, IAIN Palangka Raya: Fakultas Syariah, 2019.
- Parluhutan Daulay, Ikhsan Rosyada, *Mahkamah Konstitusi memahami keberadaannya dalam system ketatanegaraan republic Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Amos H.F, Abraham, *“Legal Opinion Teoritis & Empirisme”*, Jakarta PT Grafindo Persada, 2007.
- Syarifuddin, Amir, "Ushul Fiqh Jilid II", Jakarta: Kencana, 2009.
- Arifin, Miftahul, *“Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam”*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Syafe’I, Rachmat, *“Ilmu Ushul Fiqh”*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Joachim Friedrich, Carl, *“Filsafat Hukum Perspektif Historis”*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Erwin, Muhamad Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah, *“Fiqih Islam Wa Dillatuhu”*, Jakarta: GEMA INSANI, 2007.

Riyadi, Eko, *“Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional)”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Farid Mas’udi, Masdar, *“Syarah Konstitusi Uud 1945 Dalam Perspektif Islam”*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.

M. Gaffar, Jenedjri, *“Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)”*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

B. Internet

Pranala, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/konstitusi.html>, di akses pada tanggal 15 Maret 2019, pukul 19.00 WIB.

Pranala, <https://kbbi.web.id/mahkamah>, di akses pada tanggal 15 Maret 2019, pukul 19.00 WIB.

C. Jurnal

Mu’as, Achmad, *“Skripsi Tentang Inkonsistensi Putusan MK Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak”*, Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2015.

Marzuki, *“Jurnal Memilih Pemimpin Yang Benar Dalam Perspektif Islam”*, T.h.

Wafiyah, Rawdatul, *“Skripsi Analisis Prinsip Keadilan Terhadap Akad Rahn Emas di BMT”*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, Hukum Bisnis Syariah, 2012.

Husein Hasibuan, Hamka, *“Jurnal Pemikiran Maqāshid Syariah”*, Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, T.h.

Sodikin, *“Jurnal Pemilihan Umum Menurut Islam”*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta, Vol. XV, T.h.

Khoiru Mutho'in, Ahmad, *"Skripsi Tentang Syarat-Syarat Pemilih dalam Pilkada (Perspektif Fiqih Siyasah)"*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2009.

Aziz, Muhammad, *"Skripsi Tentang Pemeliharaan dan Pemenuhan Hak-Hak Orang Gila Pada Pasal 147 dan 148 dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam"*, Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, Tentang Hak Memilih Orang dalam Gangguan Jiwa.

Devi Kurnilla, Megasari, Karya Tulis Ilmiah, *"Tingkat Stress Pada Caregiver Pasien Gangguan Jiwa Psikotik"*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2015.

